

**DATA POKOK PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG
TRIWULAN I TAHUN 2024**

datakuakurat

DATA POKOK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	JENIS DATA	KODE	DEFINISI	RUMUS	TABEL	ANALISIS	DATA DUKUNG
I.	INDIKATOR MAKRO DAERAH						
1	Pendapatan Perkapita	IKU	v	v	v	v	v
2	Angka Kemiskinan	IKU	v	v	v	v	v
3	Ketimpangan Pendapatan (Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia)	IKU	v	v	v	v	v
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	IKU	v	v	v	v	v
II.	INDIKATOR SASARAN DAERAH						
1	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	IS	v	v	v	v	v
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	IS	v	v	v	v	v
III.	INDIKATOR PROGRAM						
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
1	Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	IP	v	v	v	v	v
2	Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	IP	v	v	v	v	v
3	Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	IP	v	v	v	v	v
4	Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik	IP	v	v	v	v	v
5	Persentase layanan publik secara elektronik	IP	v	v	v	v	v
	URUSAN STATISTIK						
1	Ketersediaan data statistik sektoral	IP	v	v	v	v	v
	URUSAN PERSANDIAN						
1	Persentase penilaian resiko keamanan informasi	IP	v	v	v	v	v
2	Persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah	IP	v	v	v	v	v

**DATA POKOK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024**

I. Indikator Makro Daerah

1. Pendapatan Per kapita

Pendapatan Per Kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara atau daerah pada suatu periode tertentu yang biasanya satu tahun (Sukirno, 2004). Cara mendapatkan besaran Pendapatan Per Kapita adalah dengan membagi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di daerah tersebut. Meskipun belum secara pasti mencerminkan pemerataan, Pendapatan Per Kapita dapat dijadikan salah satu tolok ukur guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian suatu wilayah khususnya tingkat kemakmuran penduduk secara makro. manfaat perhitungan pendapatan per kapita, yaitu:

- a. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu wilayah.
- b. Mengetahui hasil rangkaian kegiatan ekonomi suatu wilayah selama satu tahun.
- c. Sumber informasi dan alat analisis yang sangat penting, karena menggambarkan situasi dan struktur ekonomi, tingkat perkembangan, kekuatan dan kelemahan ekonomi wilayah tersebut.
- d. Dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun atau merumuskan kebijakan untuk mendorong laju pertumbuhan dan pembangunan ekonominya.
- e. Mengukur tingkat inflasi yang sedang terjadi.

Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDRB per kapita wilayah, adapun dalam mengetahui jumlah PDRB per kapita dapat menggunakan rumus berikut ini:

$$PDRB_{perkapita}(RP/Kapita) = \frac{PDRB}{\Sigma penduduk}$$

Pendapatan Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Pendapatan Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

TAHUN	PDRB Per KAPITA ADHB	
	Nilai (Ribu Rp.)	Pertumbuhan (%)
2020	27.702,75	-1,21
2021	28.484,02	2,82
2022	30.925,80	8,57
2023	33.433,54	8,10
2024 *	33.433,54	8,10

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Berdasarkan tabel Pendapatan Per Kapita diatas dapat dilihat bahwa nilai Pendapatan Per Kapita Kabupaten Temanggung secara umum selalu mengalami peningkatan. Di tahun 2021 pendapatan per kapita mengalami peningkatan namun masih sangat rendah yaitu di angka 2,82 hal ini menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid 19. Secara makro dapat diartikan bahwa kesejahteraan penduduk Kabupaten Temanggung terus membaik, namun demikian data

tersebut belum dapat menggambarkan keadaan sebenarnya karena produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung tidak hanya dimiliki/dinikmati oleh penduduk Kabupaten Temanggung saja, akan tetapi ada juga yang dimiliki/dinikmati oleh penduduk dari luar Kabupaten Temanggung yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Temanggung.

Pada tahun 2022 Pendapatan Per Kapita ADHB mengalami peningkatan 8,57% dibanding tahun 2021 yaitu di angka Rp. 30.925,80 (ribu). Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan penduduk Kabupaten Temanggung tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, tren kenaikan ini berlanjut di tahun 2023 dengan jumlah Pendapatan per kapita yang naik 8,10% dari tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 33.433,54 (ribu) dan merupakan nilai tertinggi selama periode 2020 s.d 2024.

PDRB per kapita merupakan data tahunan dan menggunakan data n-1 sebagai dasar perhitungannya, sehingga data pokok triwulan I tahun 2024 nilainya sama dengan data pendapatan per kapita di akhir tahun 2023.

2. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan persentase atau jumlah individu yang hidup di bawah garis kemiskinan dalam suatu populasi atau negara pada suatu periode waktu tertentu.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Rumus untuk menghitung angka kemiskinan dalam suatu populasi atau negara adalah sebagai berikut:

$$\text{Angka Kemiskinan} = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

Tabel 2.2
Angka Kemiskinan Tahun 2020-2024

No	Tahun	Angka Kemiskinan		
		Temanggung	Jateng	Nasional
1	2020	9,96	11,84	10,19
2	2021	10,17	11,79	9,71
3	2022	9,33	10,93	9,57
4	2023	9,26	10,77	9,36
5	2024 *	9,26	10,77	9,36

*Data tahun 2024 masih sama dengan data tahun 2023

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 hingga 2023 terjadi penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dan secara nasional. Angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung cenderung lebih rendah daripada rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, yaitu di angka 9,26 di tahun 2023,

lebih rendah 0,1 persen dibandingkan angka kemiskinan Nasional.

Tren penurunan angka kemiskinan baik di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan nasional menunjukkan adanya keberhasilan program pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan program-program pengentasan kemiskinan.

Untuk angka kemiskinan merupakan data tahunan dan menggunakan data n-1 sebagai dasar perhitungannya, sehingga data pokok triwulan I tahun 2024 nilainya sama dengan data angka kemiskinan di akhir tahun 2023.

3. Ketimpangan Pendapatan (Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia)

Pemerataan pendapatan merupakan salah satu tujuan utama dari pembangunan nasional. Semakin merata distribusi pendapatan masyarakat disuatu negara/daerah maka semakin rendah tingkat ketimpangan pendapatan, hal ini mencerminkan bahwa kesejahteraan suatu masyarakat yang ada di negara/daerah tersebut merata.

Ketimpangan distribusi pendapatan dapat diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan masyarakat dari kelompok yang berpendapatan rendah dibandingkan dengan total pendapatan penduduk (Bank Dunia). Untuk mengetahui distribusi pendapatan (ketimpangan pendapatan) suatu masyarakat dapat dihitung melalui perhitungan distribusi pengeluaran. Kriteria menurut Bank Dunia adalah sebagai berikut (dalam Susenas BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2020).

- a. Ketimpangan pengeluaran tinggi (*high inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah kurang dari 12 persen;
- b. Ketimpangan pengeluaran sedang (*moderate inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah berada diantara 12 persen sampai dengan 17 persen; dan
- c. Ketimpangan pengeluaran rendah (*low inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah berada di atas 17 persen.

Tabel 2.3
Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024*
1	40% Bawah	17,54	18,78	18,46	19,52	19,52
2	40% Tengah	36,86	35,54	36,34	36,64	36,64
3	20% Atas	45,60	45,68	45,19	44,84	44,84

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung

*Data tahun 2024 masih sama dengan tahun 2023

Data Persentase Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia menurut Kabupaten Kabupaten Temanggung tahun 2024 masih sama dengan 2023 karena Persentase Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia untuk tahun 2024 baru bisa dihitung di tahun 2025. Berdasarkan data pada tabel diatas, bisa dilihat bahwa menurut kriteria Bank Dunia, kelompok masyarakat berpendapatan rendah di tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 yaitu 19,52. Dari angka tersebut bisa dilihat bahwa di Kabupaten Temanggung ketimpangan pengeluaran rendah karena porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah berada di atas 17 persen. Porsi pendapatan mereka yang berpenghasilan rendah masih jauh dibawah kelompok berpenghasilan menengah yang menerima sejumlah 36,64 dari total pendapatan penduduk secara keseluruhan, dan jauh 44,84 persen.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka adalah seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja, dan bersedia menerima pekerjaan, serta sedang mencari pekerjaan (*International labour organization*). Biasanya pengangguran ini terjadi karena lapangan pekerjaan yang tidak tersedia atau karena adanya ketidaksesuaian antara lapangan kerja dengan keahlian tenaga kerja dan pendidikan. Permasalahan paling pokok terletak pada kesempatan kerja, ketidakseimbangan antara peningkatan penduduk usia kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia akibat lemahnya penyerapan tenaga kerja yang akan menimbulkan pengangguran yang berdampak pada ketidakstabilan ekonomi dan bidang kehidupan lainnya.

Rumus untuk menghitung Tingkat Pengangguran Terbuka di suatu wilayah adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.4
Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Temanggung dari Tahun 2020-2024

Tahun	TPT (%)	TPT Jateng	TPT Nasional
2020	3,85	6,48	5,28
2021	2,62	5,95	6,49
2022	2,54	5,57	5,83
2023	2,32	5,24	5,45
2024 *	2,32	5,24	5,45

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

*Data tahun 2024 masih sama dengan tahun 2023

Dari tabel 2.5 diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami penurunan setiap tahunnya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Temanggung tahun 2023 di angka 2,32 yang berarti bahwa diantara 100 penduduk di Kabupaten Temanggung yang masuk dalam usia angkatan kerja terdapat 3 orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Akan tetapi diluar jumlah penduduk usia kerja yang menganggur sama sekali masih banyak penduduk dalam usia kerja yang berstatus setengah pengangguran dan pengangguran terselubung, dimana pekerja yang bersangkutan mempunyai pekerjaan tetapi belum optimal dilihat dari jam kerjanya yakni 35 jam dalam seminggu, serta seseorang bekerja belum sesuai dengan keahlian dan bakat yang dimiliki.

Untuk angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan data tahunan dan menggunakan data n-1 sebagai dasar perhitungannya, sehingga data pokok triwulan I tahun 2024 nilainya sama dengan data angka TPT di akhir tahun 2023.

II. Indikator Sasaran Daerah

1. Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indek SPBE adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Permenpan RB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (*maturity level*) untuk menilai:

- 1) Domain Kebijakan Internal SPBE;
- 2) Domain Tata Kelola SPBE;
- 3) Domain Manajemen SPBE;
- 4) Domain Layanan SPBE.

Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat seperti tertera pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Predikat Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Adapun Nilai Indeks SPBE Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel 2.8 sebagai berikut:

Tabel 2.6
Indeks SPBE Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	*2024
1	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,61	2,78	3,12	2,80	2,80

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Temanggung 2024

*Data tahun 2024 masih sama dengan data tahun 2023

Capaian Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Triwulan I tahun 2024 masih menggunakan angka capaian tahun 2023 yaitu diangka 2,80, Meskipun capaian ini belum mendapati nilai tinggi, dengan indeks 2,80 (predikat baik) secara umum dapat digambarkan bahwa infrastruktur SPBE, layanan publik secara elektronik, keamanan data dan infomasi di Kabupaten Temanggung dinilai baik. Dampak manfaatnya adalah masyarakat bisa menikmati dan memanfaatkan layanan-layanan publik yang disediakan oleh Pemkab. Temanggung dengan mudah, seperti free wifi diarea publik, pelayanan publik berbasis elektronik yang efektif dan efisien, keamanan dan kenyamanan pengelolaan data pemerintah, serta jaminan tindak lanjut atas aduan dan keluhan masyarakat.

Dibawah ini disajikan hasil evaluasi nilai kematangan penyelenggaraan SPBE yang diperoleh Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

Hasil Evaluasi SPBE 2023		
Nama Form	:	Evaluasi Penerapan SPBE 2023
Tahun	:	2023
Deskripsi	:	Evaluasi Penerapan SPBE 2023
Pemerintah Kab. Temanggung		
K/L/D	:	Pemerintah Kabupaten
Indeks SPBE	:	2.8
Predikat SPBE	:	Baik
Nilai Indeks		
Domain Kebijakan SPBE	:	3.3
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	:	3.3
Domain Tata Kelola SPBE	:	2.2
Perencanaan Strategis SPBE	:	2.25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	:	2.25
Penyelenggara SPBE	:	2
Domain Manajemen SPBE	:	1
Penerapan Manajemen SPBE	:	1
Audit TIK	:	1
Domain Layanan SPBE	:	3.63
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	:	3.5
Layanan Publik Berbasis Elektronik	:	3.83

Gambar 2.1 Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 4 (empat) domain penilaian, perolehan nilai pada *Domain Manajemen* mendapati nilai yang paling rendah dibanding domain yang lain, hal ini menyebabkan nilai indeks SPBE menjadi rendah. Nilai ini dipengaruhi oleh kurangnya data dukung yang terdiri atas dokumentasi proses penyusunan dari awal hingga terbentuk dokumen manajemen SPBE. Domain Manajemen SPBE memiliki 2 (dua) aspek, yaitu aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Aspek Audit TIK. Pada aspek Penerapan Manajemen SPBE, Pemkab Temanggung mendapat maturity level 1 karena dianggap kegiatan manajemen SPBE diterapkan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana. Dalam hal ini, terdapat 8 indikator penerapan manajemen SPBE, yaitu:

- 1) Penerapan Manajemen Risiko SPBE;
- 2) Penerapan Manajemen Keamanan Informasi;
- 3) Penerapan Manajemen Data;
- 4) Penerapan Manajemen Aset TIK;
- 5) Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- 6) Penerapan Manajemen Pengetahuan;
- 7) Penerapan Manajemen Perubahan;
- 8) Penerapan Manajemen Layanan SPBE.

Secara faktual, aspek penerapan ini sudah berjalan seperti pada manajemen data, manajemen asset TIK, manajemen layanan, manajemen SDM dan manajemen keamanan. Namun pelaksanaannya belum terdokumentasi dengan baik sesuai dengan kriteria penilaian sehingga diberikan indeks maturity level 1.

Pada Aspek yang lain pada Domain Manajemen adalah Aspek Audit TIK. Pada Aspek ini terdapat 3 (tiga) indikator yaitu:

- 1) Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE
- 2) Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE
- 3) Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan keterbukaan dan pelayanan publik pada masyarakat salah satunya dapat diukur dari Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan pemeringkatan keterbukaan badan publik kabupaten/kota terhadap implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP.

Pemeringkatan keterbukaan badan publik adalah bagian dari evaluasi dan penilaian tahunan tata kelola informasi publik pada badan publik, terutama di lingkungan badan publik pemerintah kabupaten/kota. Pemeringkatan keterbukaan badan publik ini dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Untuk Pemerintah Kabupaten Temanggung terkait Keterbukaan Informasi Publik juga berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kemudian Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung dan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318 Tahun 2023 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Tahapan pemeringkatan keterbukaan badan publik adalah sebagai berikut:

- a) Pengisian Kuesioner Penilaian Mandiri/SAQ (Self Assesment Questionnaire).

Tahapan awal adalah pengisian SAQ yang hasilnya dikategorikan sebagai berikut:

Nilai SAQ 100 – 97, kategori informatif;

Nilai SAQ 96 – 80, kategori menuju informatif;

Nilai SAQ 79 – 60, kategori cukup informatif;

Nilai SAQ 59 – 40, kategori kurang informatif;

Nilai SAQ 39 – 0, kategori tidak informatif;

- b) Visitasi Verifikasi

Visitasi verifikasi dilakukan kepada 20 (dua puluh) badan publik dengan nilai SAQ tertinggi. Dalam visitasi dilakukan verifikasi atas jawaban SAQ dengan memeriksa seluruh item jawaban dengan data dukung yang tersedia.

- c) Uji Publik

Badan Publik nominatif akan di undang untuk uji publik melalui kegiatan presentasi dihadapan tim penilai. Presentasi akan melakukan penilaian terhadap kebijakan komitmen, program dan kegiatan Badan Publik dalam hal mewujudkan keterbukaan Badan Publik serta inovasi-inovasi layanan publik berbasis keterbukaan informasi.

d) Penilaian Akhir

Penilaian akhir dilakukan oleh tim penilai bersama Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk menetapkan badan publik yang memiliki tata kelola informasi publik terbaik berdasarkan akumulasi peringkat nilai. Dasar perhitungan peringkat adalah:

Penilaian akhir dilakukan oleh tim penilai bersama Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk menetapkan badan publik yang memiliki tata kelola informasi publik terbaik berdasarkan akumulasi peringkat nilai. Dasar perhitungan peringkat adalah:

- Hasil evaluasi penilaian website;
- Hasil penilaian SAQ hasil verifikasi;
- Uji publik

Tabel 2.7
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

No	Indikator Sasaran	Nilai Tahun				
		2020	2021	2022	2023	*2024
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	95,50	89,56	88,33	97,38	97,38
	Kategori	Cukup Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Informatif	Informatif

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2024

*Data tahun 2024 masih sama dengan data tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2.7 dapat dilihat, bahwa pada tahun 2023 nilai KIP Pemerintah Kabupaten Temanggung mencapai 97,38 dengan kategori Informatif. Ini merupakan capaian terbaik PPID Pemkab Temanggung dalam pelaksanaan implementasi KIP sejak tahun 2012.

Prestasi tersebut dikarenakan oleh upaya dan kerja keras dari seluruh pemangku keterbukaan informasi publik di Pemkab Temanggung, baik PPID Utama, PPID Pembantu dan semua *stakeholder*.

Upaya tersebut antara lain dengan penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana PPID, pengesahan regulasi dan SOP, pendampingan, monitoring dan evaluasi rutin PPID Pembantu, pengembangan *website* dan *dashboard* PPID, serta peningkatan layanan kepada masyarakat. Adapun faktor pendorong, penghambat dan upaya perbaikan kedepan, diuraikan sebagai berikut:

- Faktor Pendorong
 1. Meningkatnya kapasitas SDM pelaku PPID Pemkab Temanggung;
 2. Pendampingan, monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan;
 3. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika, dengan melakukan kegiatan pembinaan secara intensif dan terstruktur.
- Faktor Penghambat
 1. Masih minimnya kelompok informasi masyarakat yang berperan aktif dalam penyebaran informasi;
 2. Implementasi keterbukaan informasi publik pada PPID Pelaksana di lingkup Pemkab Temanggung belum optimal disebabkan pengelola PPID Pelaksana sering terjadi pergantian.

- Upaya Kedepan
 1. Melakukan bimbingan kepada PPID Pelaksana melalui sosialisasi dan pendekatan persuasif.
 2. Pendampingan kepada PPID Pelaksana secara berkala dengan prioritas bagi PPID yang pengelolaanya masih rendah.

Gambar 2.2 merupakan piagam penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, dan Gambar 2.3 merupakan berita prestasi PPID Pemkab Temanggung.



Gambar 2.2
Penghargaan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023



Gambar 2.3
Berita PPID Pemkab Temanggung Berhasil Raih Kategori Informatif

III. Indikator Program Dinkominfo

A. Urusan Komunikasi dan Informatika

1 Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif

Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 08 /Per/M.Kominfo/6/2010 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Provinsi Jawa Tengah terkait Lembaga Komunikasi Sosial, Dinkominfo memiliki tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, dan optimalisasi diseminasi informasi dengan lembaga binaan tersebut.

Lembaga binaan tersebut meliputi Lembaga Penyiaran di Kabupaten Temanggung, Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra), Saka Milenial, Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI), dan Relawan Teknologi Informasi Komunikasi (RTIK), dengan rincian jumlah total lembaga binaan Dinkominfo, sebagai berikut:

1. Lembaga Penyiaran
 - a) Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), yaitu Radio Temanggung (eRTe) FM, dan Temanggung TV (2)
 - b) Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), yaitu OFA Radio, Shantika FM, Angkasa Tujuh, Radio O2, dan Pop FM (5)
2. FK Metra
3. Relawan TIK
4. Saka Milenial
5. ORARI
6. RAPI
7. KIM (90)

Rumus untuk menghitung persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif adalah; Jumlah lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif **dibagi** Jumlah total lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo **dikali** 100%.

Tabel 2.8

Persentase Lembaga Binaan dan Mitra Diseminasi Informasi Dinkominfo yang aktif

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	na	na	na	na	100

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat, bahwa pada tahun 2024 nilai persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif yang merupakan indikator program tahun pertama Renstra 2024-2026 mencapai 100 persen, angka ini ditunjang oleh keaktifan Lembaga Penyiaran, FK Metra, Saka Milenial, RTIK, ORARI dan RAPI. Adapun untuk KIM belum seluruhnya aktif, disamping masih adanya pembentukan KIM-KIM baru dengan berlatarbelakang hobi/interest dan kewilayahan (KIM Desa).

Tabel 2.9
Keaktifan Lembaga Binaan dan Mitra Diseminasi Informasi Dinkominfo

No	Nama Lembaga	Jumlah	Aktif	Tidak Aktif
1	Lembaga Penyiaran	7	7	0
2	FK Metra	1	1	0
3	Relawan TIK	1	1	0
4	Saka Milenia	1	1	0
5	Orari	1	1	0
6	Rapi	1	1	0
7	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	90	71	19
	Jumlah	102	83	19

Tabel 2.10
Lembaga Penyiaran Kabupaten Temanggung

No	Nama	Aktif	Tidak Aktif
1	LPPL Radio Temanggung (eRTe FM)	v	
2	LPPL Temanggung TV	v	
3	Radio Angkasa 7	v	
4	Radio OFA	v	
5	Radio O2	v	
6	Radio Santika		V
7	POP FM Parakan	v	
	Jumlah	6	1

Tabel 2.11
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten Temanggung

NO.	NAMA KIM	ALAMAT	TAHUN PEMBENTUKAN	STATUS	
				AKTIF	TIDAK AKTIF
1	Kayana	Desa Danupayan Kec. Bulu	2017	✓	
2	Tergalurung	Desa Tegalurung Kec. Bulu	2017	✓	
3	Almond	Desa Mondoretno Kec. Bulu	2017	✓	
4	Sari Makmur	Desa Campursari Kec. Bulu	2017		✓
5	Sebid	Desa Putat Kec. Bulu	2017		✓
6	Bansari	Desa Bansari Kec. Bulu	2017		✓
7	Pandemulyo	Desa Pandemulyo Kec. Bulu	2017		✓
8	Ngudi Sari	Desa Malangsari Kec. Bulu	2017		✓
9	Pengilon	Desa Pengilon Kec. Bulu	2017	✓	
10	Loh Jinawi	Desa Gandurejo Kec. Bulu	2017	✓	
11	Prasasti	Desa Gondosuli Kec. Bulu	2017		✓
12	Cinta Ngimbrang	Desa Ngimbrang Kec. Bulu	2017		✓
13	Madani	Desa Pagergunung Kec. Bulu	2017	✓	
14	KIM Pakurejo	Desa Pakurejo Kec. Bulu	2017		✓
15	De Pasthi	Desa Pasuruhan Kec. Bulu	2017	✓	
16	KIM Tegalrejo	Desa Tegalrejo Kec. Bulu	2017	✓	
17	Tirto Meteor	Desa Wonotirto Kec. Bulu	2017		✓
18	Wonosari	Desa Wonosari Kec. Bulu	2017	✓	
19	Bulu Jaya	Desa Bulu Kec. Bulu	2017		✓
20	Maju Makmur	Desa Karangtejo Kec. Jumo	2018		✓
21	Bersama	Desa Jombor Kec. Jumo	2018		✓

NO.	NAMA KIM	ALAMAT	TAHUN PEMBENTUKAN	STATUS	
				AKTIF	TIDAK AKTIF
22	Jaya Utama	Desa Jamusan Kec. Jumo	2018	✓	
23	Tentrem	Desa Sukomarto Kec. Jumo	2018		✓
24	Legowo	Desa Giyono Kec. Jumo	2018	✓	
25	Podod Maju	Desa Morobongo Kec. Jumo	2018	✓	
26	Taruna Bhakti	Desa Barang Kec. Jumo	2018		✓
27	Manggala	Desa Gununggempol Kec. Jumo	2018	✓	
28	Berlian	Desa Padureso Kec. Jumo	2018		✓
29	Lancar Jaya	Desa Kertosari Kec. Jumo	2018	✓	
30	Damai Sejahtera	Desa Ketitang Kec. Jumo	2018	✓	
31	Sido Dadi	Desa Gedongsari Kec. Jumo	2018	✓	
32	Adipati Sindurejo	Desa Jumo Kec. Jumo	2018		✓
33	Campurejo Digdaya	Desa Campurejo Kec. Tretep	2022	✓	
34	Notif	Desa Tretep Kec. Tretep	2022		✓
35	Tlogo Wangi	Desa Tlogo Kec. Tretep	2022	✓	
36	Bojong Sejahtera	Desa Bojong Kec. Tretep	2022	✓	
37	KIM Desa Bendungan	Desa Bendungan Kec. Tretep	2022	✓	
38	Bonjor Bersinar	Desa Bojor Kec. Tretep	2022		✓
39	Abhi Praya	Desa Simpar Kec. Tretep	2022		✓
40	Nglarangan Andalan	Desa Nglarangan Kec. Tretep	2022	✓	
41	Raharjo	Desa Sigedong Kec. Tretep	2022	✓	
42	Tempelsari Bangkit	Desa Tempelsari Kec. Tretep	2022	✓	
43	Donorojo Maju	Desa Donorojo Kec. Tretep	2022		✓
44	Pamitran	Desa Pitrosari Kec. Wonobojo	2022	✓	
45	-	Desa Wates Kec. Wonobojo	2022		✓
46	KIM Pateken	Desa Pateken Kec. Wonobojo	2022	✓	
47	Rejo Mandiri	Desa Rejosari Kec. Wonobojo	2022	✓	
48	Semoetgatel	Desa Tening Kec. Wonobojo	2022	✓	
49	-	Desa Wonocoyo Kec. Wonobojo	2022		✓
50	Tawangsari Berdaulat	Desa Tawangsari Kec. Wonobojo	2022		✓
51	Mandiri	Desa Wonobojo Kec. Wonobojo	2022	✓	
52	Ndeso Adem	Desa Kebonsari Kec. Wonobojo	2022		✓
53	-	Desa Cemoro Kec. Wonobojo	2022	✓	
54	Mandiri	Desa Purwosari Kec. Wonobojo	2022		✓
55	Bangun Jiwo	Desa Pesantren Kec. Wonobojo	2022		✓
56	Parikesit	Desa Semen Kec. Wonobojo	2022	✓	
57	Langgeng Gumregah	Desa Langgeng Kec. Tlogomulyo	2023	✓	
59	Jaya Mandiri	Desa Losari Kec. Tlogomulyo	2023	✓	
59	Kebondalem Lugas	Desa Kebondalem Kec. Bejen	2023	✓	

NO.	NAMA KIM	ALAMAT	TAHUN PEMBENTUKAN	STATUS	
				AKTIF	TIDAK AKTIF
60	Menggora Jaya	Desa Menggora Kec. Tembarak	2023	✓	
61	Barokah	Desa Purwodadi Kec. Temarak	2023	✓	
62	BLITZ	Desa Banjarsari Kec. Ngadirjo	2023	✓	
63	Kataan		2023	✓	
64	Pringsurat	Desa Pringsurat Kec. Pringsurat	2023	✓	
65	Berdaya	Desa Kebuman Ke. Pringsurat	2023	✓	
66	Kopen	Desa Kopen Kec. Pringsurat	2023	✓	
67	Bangkit	Desa Karangwuni Kec.Pringsurat	2023	✓	
68	Gowak	Desa Gowak Kec. Pringsurat	2023	✓	
69	Bangkit	Desa Rejosari Kec.Pringsurat	2023	✓	
70	Ngipik Bersatu	Desa Ngipik Kec. Pringsurat	2023	✓	
71	Kokoh Mandiri	Desa Pingit Kec.Pringsurat	2023	✓	
72	Wonokerso Hebat	Desa Wonokerso Kec.Pringsurat	2023	✓	
73	Tegowanuh Jaya	Desa Twgowanuh Kec. Kaloran	2023	✓	
74	Pengayoman	Kel.Temanggung II Kec.Tmg	2023	✓	
75	JOTEC	Desa Joho Kec.Tmg	2023	✓	
76	"NN"	Desa Nampirejo Kec.Tmg	2023	✓	
77	Lentera Jurang	Kel.Jurang Kec.Tmg	2023	✓	
78	Madukismo	Kel.Madureso Kec.Tmg	2023	✓	
79	Manding Kreatif	Kel.Manding Kec.Tmg	2023	✓	
80	Purworwo Kreatif	Kel.Purworejo Kec.Tmg	2023	✓	
81	e- pawartos	Kel.Walitelon Utara Kec.Temanggung	2023	✓	
82	Berdikari	Desa Candimulyo Kec.Kedu	2023	✓	
83	Berbudi Luhur	Desa Danurejo Kec.Kedu	2023	✓	
84	Berisik	Desa Gondangwayang Kec.Kedu	2023	✓	
85	Karangtejo Update	Desa Karangtejo Kec.Kedu	2023	✓	
86	Cerdas	Desa Kutoanyar Kec.Kedu	2023	✓	
87	Berseri	Desa Mergowati Kec. Kedu	2023	✓	
88	Berdikari	Desa Mojotengah Kec. Kedu	2023	✓	
89	Mandiri	Desa Bojonegoro Kec. Kedu	2023	✓	
90	KEDU	Desa Kedu Kec.Kedu	2023	✓	
Jumlah				90	

A. Persentase Terselenggaranya Diseminasi Informasi Melalui Kanal Media Elektronik dan Non Elektronik

Diseminasi informasi merupakan kewajiban yang melekat pada pemerintah dengan seluruh unturnya dengan melibatkan seluruh kanal komunikasi dan media yang dikelola. Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/KOMINFO/03/2009 yang menyatakan bahwa diseminasi informasi bertujuan untuk mencerdaskan bangsa, memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat integritas (persatuan dan kesatuan) nasional.

Adapun arah dari diseminasi informasi adalah untuk mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang transparan dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyebaran informasi. Diseminasi informasi juga untuk memenuhi hak publik/masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, cepat dan mudah diakses.

Dinkominfo sebagai lembaga teknis daerah yang memiliki tugas dan kewajiban melaksanakan diseminasi informasi mengelola media dan kanal komunikasi publik, yaitu Media Komunikasi Resmi Milik Pemerintah Daerah (Website, Media Center, Media Sosial, Videotron, Baliho Luar Ruang) serta LPPL Temanggung TV dan LPPL Radio Temanggung.

Adapun persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik didapatkan dengan rumus: Jumlah konten diseminasi informasi yang terealisasi **dibagi** Jumlah total konten diseminasi informasi yang ditargetkan **dikali** 100% (total target konten dalam satu tahun yaitu 1.460 konten)

Tabel 2.12
Persentase Terselenggaranya Diseminasi Informasi Melalui Kanal Media Elektronik dan Non Elektronik Tahun 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Terselenggaranya Diseminasi Informasi Melalui Kanal Media Elektronik dan Non Elektronik	na	na	na	na	32,60

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian Indikator Program Persentase Terselenggaranya Diseminasi Informasi Melalui Kanal Media Elektronik dan Non Elektronik pada Triwulan I Tahun 2024 tercapai 32,60%. Capaian ini mengukur pada sifat konten publikasi dan informasi yang diupdate, mengikuti perkembangan isu, kejadian dan kebijakan yang ada pada tahun 2024 ini.

Tabel 2.13
Konten Diseminasi Informasi Media dan kanal Komunikasi Publik Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Jenis Kanal Media	Target Konten	Realisasi	Persentase
1	Media Elektronik	1390	469	32,12
2	Media Non elektronik	70	7	00,5
	Jumlah	1460	476	32,6

B. Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo

Dinkominfo menjadi lembaga teknis daerah yang memiliki tugas dan kewajiban untuk memfasilitasi layanan pelaporan dan aduan dari masyarakat, berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 337/166 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana Short Message Service (SMS) Gateway dan Whatsapp (WA) Gateway Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Adapun persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo, didapatkan dengan rumus: Jumlah laporan dan aduan yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah total laporan dan aduan dikali 100%

Tabel 2.14
Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Aduan Masyarakat Melalui Kanal Aduan yang dikelola Dinkominfo

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	n/a	n/a	n/a	n/a	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian Indikator Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Aduan Masyarakat Melalui Kanal Aduan yang dikelola Dinkominfo tercapai 100%. Dari 229 laporan aduan masyarakat yang diajukan kepada Dinkominfo semua sudah ditindaklanjuti yaitu sejumlah 229 aduan.

Layanan aduan yang dikelola oleh Pemkab Temanggung adalah:

1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional / Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. SP4N LAPOR! Aplikasi dari Pemerintah Pusat dikelola oleh MenPAN RB;
2. LapoGub Portal Laporan Pengaduan Online Provinsi Jawa Tengah dikelola oleh Dinkominfo Provinsi Jawa Tengah,
3. SMS Gateway dan Whatsapp Gateway (WAGE) dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (sebagai super admin) dan Perangkat Daerah (sebagai admin)

Laporan dan dan aduan media sosial yang dikelola Pemkab Temanggung @pemkabtmg; @temanggungmediacenter; @kominfotmg, dan akun2 resmi media sosial yang dikelola oleh Perangkat Daerah

Tabel 2.15
Rekapitulasi Tindak Lanjut Penyelesaian Aduan Masyarakat Sd. Triwulan I Tahun 2024

No	Media Layanan Aduan	Jumlah Aduan	Aduan Selesai	Persentase
1	SP4N lapor	3	3	100%
2	LaporGub	29	29	100%
3	SMS Gateway & Whatsapps Gateway (Wage)	225	225	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian Indikator Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Aduan Masyarakat Melalui Kanal Aduan yang dikelola Dinkominfo tercapai 100%. Dari 257 laporan aduan masyarakat yang diajukan kepada Dinkominfo semua sudah ditindaklanjuti yaitu sejumlah 257 aduan.

2 Persentase Kinerja infrastruktur TIK yang baik

Di tengah arus modernisasi dan transformasi digital yang melanda dunia saat ini, infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi fondasi penting bagi kemajuan sebuah wilayah, tak terkecuali Kabupaten Temanggung. Sebagai sebuah entitas pemerintahan yang progresif, pemerintah Kabupaten Temanggung telah mengarahkan perhatiannya pada pengembangan infrastruktur TIK yang berkualitas dan responsif. Dengan kesadaran akan pentingnya konektivitas digital dalam mendukung berbagai aspek pembangunan, baik dalam pelayanan publik maupun sektor ekonomi lokal, upaya pembangunan infrastruktur TIK yang baik menjadi sebuah prioritas yang tak terelakkan.

Kinerja infrastruktur TIK yang baik di Kabupaten Temanggung tercermin melalui berbagai indikator, mulai dari ketersediaan akses internet yang luas dan cepat hingga integrasi sistem informasi yang efisien dalam proses administratif pemerintahan. Dengan adopsi teknologi yang tepat, pemerintah Kabupaten Temanggung mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengurangi kesenjangan akses informasi, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor usaha dan inovasi.

Angka presentasi kinerja infrastruktur TIK yang baik diperoleh dari rumus jumlah OPD dengan infrastruktur TIK yang berfungsi/bisa dipakai dibagi dengan jumlah OPD yang terfasilitasi infrastruktur TIK dikali 100%. Adapun capaian hingga tahun 2024 Triwulan I disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.16
Persentase Kinerja Infrastruktur TIK yang baik di Kab. Temanggung
Sd. Triwulan I Tahun 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Kinerja Infrastruktur TIK yang baik	n/a	n/a	n/a	n/a	98,55

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Kinerja Infrastruktur TIK di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sudah terkoneksi mencapai 98,55% sedangkan pada tahun sebelumnya n.a itu dikarenakan Indikator diatas merupakan indikator baru.

Faktor pendorong ketercapaian indikator kinerja infrastruktur TIK yang baik adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Daerah nomor 22 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Bupati Temanggung nomor 83 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mendorong pemanfaatan jaringan intranet untuk proses bisnis Pemerintah Kabupaten Temanggung
- 2) Telah tersedianya Infrastruktur TIK berupa jaringan fiber optic dan jaringan radio (antena) untuk mengkoneksikan Jaringan internet ke OPD (Dinas , Kecamatan dan kelurahan) di Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Adapun faktor penghambat indikator tersebut adalah :

- 1) Perangkat kedaluwarsa atau tidak tergantikan yaitu peralatan jaringan yang sudah usang atau tidak lagi didukung oleh produsen dapat menyebabkan kinerja jaringan menjadi terganggu jika terjadi kerusakan pada peralatan tersebut yang sudah tidak di produksi lagi oleh produsen atau pabrik (discontinue).
- 2) Kerusakan fisik atau gangguan infrastruktur fisik seperti peralatan repeater pada tower rentan terhadap kerusakan fisik akibat faktor alam seperti terkena petir karena memang beberapa tempat daerah rawan petir.

Tabel 2.17
Data Jumlah OPD yang terfasilitasi Infrastruktur TIK dari Dinkominfo
Kabupaten Temanggung

No	Uraian	2024	Terkoneksi Jaringan Dinkominfo	Kondisi	
				Aktif	Tidak aktif
1	Jumlah Kantor/Badan/Dinas	26	26	26	-
2	Jumlah Kecamatan	20	20	20	-
3	Jumlah Kelurahan	23	23	23	-
JUMLAH		69	69	69	-

Tabel 2.18
Data Kantor/Badan/Dinas yang terfasilitasi Infrastruktur TIK dari
Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Instansi	Status	
		Aktif	Tidak Aktif
1	Dinas Perhubungan	√	
2	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	√	
3	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	√	
4	Dinas Kesehatan	√	
5	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	√	
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	√	
7	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	√	
8	DPRD Temanggung	√	
9	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik	√	
10	Dinas Sosial	√	
11	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	√	
12	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	√	
13	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	√	
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	√	
15	Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah (BPRSUD Djoyonegoro)	√	
16	Dinas Tenaga Kerja	√	
17	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	√	
18	Dinas Lingkungan Hidup	√	
19	Satpol PP Dan Pemadam Kebakaran	√	
20	Sekretariat Daerah	√	
21	Inspektorat	√	
22	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	√	
23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	√	
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	√	
25	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	√	
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	√	
Jumlah		26	-

Tabel 2.19
Data Kecamatan yang terfasilitasi Infrastruktur TIK dari Dinkominfo
Tahun 2024

No	Instansi	Status	
		Aktif	Tidak Aktif
1	Kecamatan Temanggung	√	
2	Kecamatan Pringsurat	√	
3	Kecamatan Kranggan	√	
4	Kecamatan Selopampang	√	
5	Kecamatan Tembarak	√	
6	Kecamatan Tlogomulyo	√	
7	Kecamatan Bulu	√	
8	Kecamatan Kedu	√	
9	Kecamatan Kaloran	√	
10	Kecamatan Kandangan	√	
11	Kecamatan Jumo	√	
12	Kecamatan Gemawang	√	
13	Kecamatan Bansari	√	
14	Kecamatan Kledung	√	
15	Kecamatan Ngadirejo	√	
16	Kecamatan Candiroto	√	
17	Kecamatan Wonobojo	√	
18	Kecamatan Tretep	√	
19	Kecamatan Bejen	√	
20	Kecamatan Parakan	√	
Jumlah		20	-

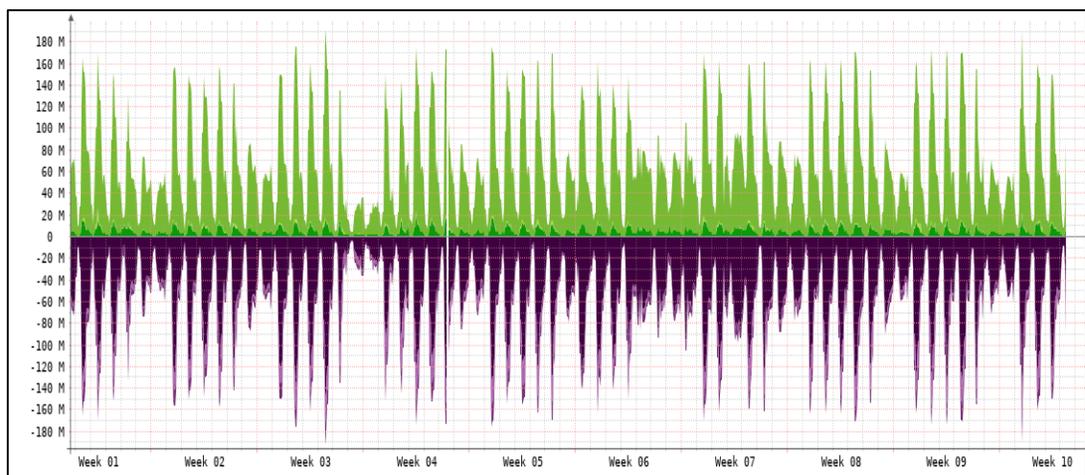
Tabel 2.20
Data Kelurahan yang terfasilitasi Infrastruktur TIK dari Dinkominfo
Tahun 2024

No	Instansi	Status	
		Aktif	Tidak Aktif
1	Kelurahan Kranggan	√	
2	Kelurahan Manggong	√	
3	Kelurahan Parakan Kauman	√	
4	Kelurahan Parakan Wetan	√	
5	Kelurahan Banyuurip	√	
6	Kelurahan Temanggung I	√	
7	Kelurahan Temanggung II	√	
8	Kelurahan Butuh	√	
9	Kelurahan Jampirejo	√	
10	Kelurahan Jampiroso	√	
11	Kelurahan Kertosari	√	
12	Kelurahan Kowangan	√	
13	Kelurahan Sidorejo	√	
14	Kelurahan Jurang	√	
15	Kelurahan Kebonsari	√	
16	Kelurahan Manding	√	
17	Kelurahan Mungseng	√	
18	Kelurahan Giyanti	√	
19	Kelurahan Purworejo	√	
20	Kelurahan Madureso	√	
21	Kelurahan Tlogorejo	√	

No	Instansi	Status	
		Aktif	Tidak Aktif
22	Kelurahan Walitelon Selatan	√	
23	Kelurahan Walitelon Utara	√	
Jumlah		23	-

Dari tabel data dukung diatas terdapat satu kelurahan walitelon utara yang status infrastruktur jaringan internetnya down dikarenakan terdapat peralatan antenna yang rusak dan belum ada penggantinya karena alat tersebut sudah discontinue atau tidak di produksi dari pabrik lagi. Jika mengganti peralatan dengan merk/tipe berbeda maka koneksi tidak bisa dilakukan karena karakteristik alat saat dikoneksi tidak mendukung, sehingga jika mau diganti dengan alat yang berbeda jaringan backbone yang menuju Kelurahan Walitelon juga harus dirubah.

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang kuat dan handal adalah fondasi utama bagi pelayanan yang efisien dan efektif. Dengan membangun dan mengelola infrastruktur TIK yang baik, kami telah mampu meningkatkan kualitas layanan kepada OPD sebagai client kami dengan memberikan Service Level Agreement (SLA) minimal 90% dari total performance dalam Triwulan tiap tahunnya.



Gambar 2.4
Grafik koneksi internet di OPD



Gambar 2.5
Grafik koneksi internet di Kecamatan



Gambar 2. 6
Grafik koneksi internet di Kelurahan

3 Persentase layanan publik secara elektronik

Layanan publik adalah segala jenis pelayanan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga yang didanai oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Layanan publik ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, infrastruktur, keamanan, dan lain sebagainya. Layanan publik dapat berupa penyediaan fasilitas, program-program pemerintah, atau pengaturan berbagai kegiatan untuk memastikan kepentingan masyarakat terpenuhi. Dalam banyak kasus, layanan publik juga mencakup kegiatan pengawasan dan pengaturan untuk memastikan bahwa layanan tersebut disediakan dengan standar yang sesuai dan dapat diakses oleh semua anggota masyarakat.

Layanan publik elektronik adalah layanan publik yang disediakan secara elektronik melalui platform digital, seperti internet atau aplikasi mobile. Layanan ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan aksesibilitas yang lebih mudah dan cepat bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan mengakses berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga lainnya.

Layanan publik elektronik memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

- 1) Aksesibilitas yang lebih baik: Masyarakat dapat mengakses layanan tersebut dari mana saja dan kapan saja selama memiliki akses internet.
- 2) Efisiensi: Proses administrasi dapat dilakukan secara otomatis, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan baik bagi pemerintah maupun masyarakat.
- 3) Transparansi: Informasi mengenai layanan publik dapat disajikan secara transparan, memungkinkan masyarakat untuk memahami proses dan persyaratan yang dibutuhkan dengan lebih baik.
- 4) Peningkatan partisipasi masyarakat: Dengan memudahkan akses dan proses penggunaan, layanan publik elektronik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai program atau kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Namun, untuk memastikan keberhasilan dan efektivitasnya, layanan publik elektronik juga perlu memperhatikan keamanan data pribadi, aksesibilitas bagi mereka yang tidak memiliki akses teknologi, serta dukungan teknis yang memadai.

Adapun untuk menentukan persentase layanan public elektronik dengan rumus jumlah layanan publik elektronik dibagi jumlah layanan publik yang ditetapkan di lingkungan Pemerintah kabupaten Temanggung dikali 100%.

Tabel 2.21
 Persentase Layanan Publik Secara Elektronik Kabupaten Temanggung
 sd. Triwulan I Tahun 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase layanan publik secara elektronik	na	na	na	na	58,02

Tabel 2.22
 Jumlah Layanan Publik Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Uraian	Jumlah	Keterangan
Jumlah layanan publik yang ditetapkan	131	
Jumlah layanan publik secara elektronik	38	
Persentase	29 %	

Berdasarkan tabel diatas bahwa pada triwulan 1 tahun 2024 sudah dilaksanakan proses layanan publik secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Sedangkan untuk target kinerja pada tahun 2024 sebesar 50%. Untuk itu dibutuhkan kerja keras dan koordinasi dari semua penyelenggara layanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung agar realisasi layanan publik secara elektronik bisa tercapai.

Tabel 2.23
 Daftar Layanan Publik Yang Ditetapkan

No	Jenis Layanan Publik	Pemilik Layanan
1	Layanan pelaporan sms gateway	Sekretariat DPRD
2	Layanan Informasi produk Hukum	Sekretariat DPRD
3	Layanan Informasi produk Hukum	Sekretariat DPRD
4	Layanan perijinan	DPMPTSP
5	Layanan retribusi sampah	DPRKPLH
6	Layanan pengangkutan sampah	DPRKPLH
7	Surat Keterangan Terdaftar bagi Kelompok Tani	DKPP
8	Fasilitasi Penentuan Calon Lokasi Penanaman Bawang Putih bagi Importir Bawang Putih	DKPP
9	Permohonan Data-Data terkait Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan	DKPP
10	Penerbitan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT PDUK)	DKPP
11	Penyewaan Gedung Graha Mina Bhakti Pasar Ikan Dangkel	DKPP
12	Penyewaan Guesthouse	DKPP
13	Penyewaan Mess / Penginapan	DKPP
14	Penyewaan Los Benih Ikan	DKPP
15	Penyewaan Los Ikan Konsumsi	DKPP
16	Penyewaan Kios	DKPP
17	Penjualan Ikan	DKPP
18	Bimbingan Teknis Perikanan	DKPP
19	Rekomendasi Teknis Kelompok Tani Ternak / Peternak	DKPP

No	Jenis Layanan Publik	Pemilik Layanan
20	Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan BAH	DKPP
21	Bantuan Vaksin, obat per-oral dan desinfektan	DKPP
22	Tanggap cepat kejadian penyakit zoonosis (Rabies)	DKPP
23	Tanggap cepat kejadian penyakit zoonosis (Avian Influenza);	DKPP
24	Jasa Pematangan Hewan	DKPP
25	Pelayanan Inseminasi Buatan	DKPP
26	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan	DKPP
27	Rekomendasi Perijinan Usaha Perikanan	DKPP
28	Rekomendasi Surat Izin Budidaya Ikan (SIUBI)	DKPP
29	Rekomendasi Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (SIUPHP)	DKPP
30	Rekomendasi Izin Tempat Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Tempat Praktek Dokter Hewan Mandiri	DKPP
31	Rekomendasi Izin Tempat Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Tempat Praktek Dokter Hewan Praktek Bersama	DKPP
32	Rekomendasi Izin Tempat Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Klinik Hewan	DKPP
33	Rekomendasi Ijin tempat Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan Bagi Rumah sakit Hewan	DKPP
34	Rekomendasi Izin Praktek Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Praktek Dokter Hewan Mandiri	DKPP
35	Rekomendasi Izin Praktek Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Praktek Dokter Warga Negara Asing	DKPP
36	Rekomendasi Izin Praktek Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Tenaga Sarjana Kedokteran Hewan dan Paramedik Veteriner	DKPP
37	Rekomendasi Ijin Melakukan Pelayanan Inseminasi Buatan	DKPP
38	Rekomendasi Ijin Usaha Peredaran Obat Hewan di depo Obat Hewan, Pet Shop dan Poultry Shop.	DKPP
39	Rekomendasi Ijin Usaha Peredaran Obat Hewan di toko Hewan	DKPP
40	Rekomendasi Izin Usaha Pemeotongan Hewan Ruminasia	DKPP
41	Rekomendasi Izin Usaha Pematangan Unggas	DKPP
42	Rekomendasi Izin Jagal	DKPP
43	Rekomendasi Izin Menjual Daging	DKPP
44	Rekomendasi Izin Usaha Pemerahan Susu	DKPP
45	Rekomendasi Izin Menjual Susu Segar	DKPP
46	Rekomendasi Izin Usaha Produk Telur Unggas Konsumsi	DKPP
47	Rekomendasi Izin Tempat Pemeliharaan Hewan Kesayangan Bagi Tempat Penitipan Hewan	DKPP
48	Rekomendasi Izin Tempat Pemeliharaan Hewan Kesayangan Bagi Tempat Salon Hewan	DKPP
49	Rekomendasi Izin Tempat Pembibitan Hewan Kesayangan	DKPP
50	Rekomendasi Izin Usaha Peternakan	DKPP
51	Rekomendasi Izin Usaha Pakan	DKPP
52	Rekomendasi Izin Perluasan Usaha Peternakan	DKPP
53	Pelayanan Penilaian Kesesuaian Standar Izin Operasional Puskesmas;	DKK
54	Pelayanan Penilaian Kesesuaian Standar Izin Operasional Rumah Sakit;	DKK
55	Pelayanan Penilaian Kesesuaian Standar Izin Klinik	DKK
56	Pelayanan Penilaian Kesesuaian Standar Apotek;	DKK

No	Jenis Layanan Publik	Pemilik Layanan
57	Pelayanan Penilaian Kesesuaian Standar Usaha Toko Obat;	DKK
58	Pelayanan Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IRT)	DKK
59	Pelayanan Rekomendasi Izin Praktik Dokter/Dokter Spesialis/Dokter Gigi;	DKK
60	Pelayanan Rekomendasi Izin Praktik Perawat;	DKK
61	Pelayanan Rekomendasi Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;	DKK
62	Pelayanan Rekomendasi Izin Praktik Bidan;	DKK
63	Pelayanan Rekomendasi Izin Praktik Apoteker;	DKK
64	Pelayanan Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;	DKK
65	Pelayanan Rekomendasi Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah;	DKK
66	Pelayanan Rekomendasi Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;	DKK
67	Pelayanan Rekomendasi Izin Kerja Radiografer;	DKK
68	Pelayanan Rekomendasi Izin Kerja Fisioterapis;	DKK
69	Pelayanan Rekomendasi Izin Kerja Elektromedik;	DKK
70	Pelayanan Rekomendasi Izin Kerja Okupasi Terapi;	DKK
71	Pelayanan Rekomendasi Izin Kerja Terapis Wicara;	DKK
72	Pelayanan Rekomendasi Izin Kerja Refraksionis Optisien;	DKK
73	Pelayanan Rekomendasi Izin Kerja Perekam Medis;	DKK
74	Pelayanan Rekomendasi Izin Kerja Tenaga Sanitarian;	DKK
75	Rekomendasi Izin Pelayanan Kerja Tenaga Gizi;	DKK
76	Pelayanan Perizinan Depot Air Minum;	DKK
77	Pelayanan Perizinan Jasa Boga;	DKK
78	Pelayanan Pendaftaran Penyehat Tradisional;	DKK
79	Pelayanan Rekomendasi Ambulans	DKK
80	Layanan Retribusi Pasar	Dinkopdag
81	Layanan Tera Metrologi	Dinkopdag
82	Layanan pesan perak	DPPPKBPA
83	Layanan Pengaduan Aplikasi	Dinkominfo
84	Layanan PPID	Dinkominfo
85	Layanan Data Statistik Temanggung	Dinkominfo
86	Layanan Retribusi Pajak	BPKPAD
87	Layanan PPDB	Dindikpora
88	Layanan Dapodik	Dindikpora
89	Layanan Kependudukan	Dindikcapil
90	Layanan Perijinan Paten	Kecamatan
91	Rawat Jalan	RSUD
92	Rawat Inap	RSUD
93	Layanan Penunjang Medis dan Non Public	RSUD
94	Layanan Kegawatdaruratan	RSUD
95	Layanan Kir Kendaraan	Dishub
96	Layanan Sanka	Dinsos
97	Layanan Data Kemiskinan	Dinsos
98	Layanan Data Pariwisata	Disbudpar
99	Layanan Pendataan Kesenian	Disbudpar
100	Tanda Daftar LPKS/BLK Komunitas	Dinperinaker
101	Ijin Operasional LPKS/BLK Komunitas	Dinperinaker
102	Rekomendasi Magang	Dinperinaker
103	Rekomendasi Pelatihan	Dinperinaker

No	Jenis Layanan Publik	Pemilik Layanan
104	Pendaftaran Kartu AK 1/Kartu Kuning	Dinperinaker
105	Verifikasi CPMI	Dinperinaker
106	Pengesahan perjanjian penempatan CPMI	Dinperinaker
107	Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (BKK)	Dinperinaker
108	Layanan Informasi Lowongan Kerja	Dinperinaker
109	Fasilitasi Rekrutmen tenaga kerja	Dinperinaker
110	Layanan Bimbingan Jabatan dan Penyuluhan jabatan	Dinperinaker
111	Konseling bagi penerima JKP	Dinperinaker
112	Validasi penggunaan Tenaga Kerja Asing	Dinperinaker
113	Fasilitasi Kasus Pekerja Migran	Dinperinaker
114	Unit Layanan Disabilitas	Dinperinaker
115	Pelayanan Pelatihan Produktivitas	Dinperinaker
116	Pelatihan industri	Dinperinaker
117	Fasilitasi Kemasan Fasilitasi pendaftaran merk	Dinperinaker
118	Rekomendasi keringan pendaftaran Merk	Dinperinaker
119	Verifikasi ijin usaha via OSS	Dinperinaker
120	Pendampingan Pendaftaran	Dinperinaker
121	Pencatatan Serikat Pekerja	Dinperinaker
122	Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	Dinperinaker
123	Fasilitasi Pengesahan Peraturan Perusahaan	Dinperinaker
124	Fasilitasi Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama	Dinperinaker
125	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hubungan Industrial/Mediasi Kasus HI	Dinperinaker
126	Pendaftaran Perjanjian Jasa Pekerja	Dinperinaker
127	Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit	Dinperinaker
128	Permohonan ijin persetujuan bangunan gedung	DPUPR
129	permohonan persetujuan kpr	DPUPR
130	ijin pinjam sewa alat berat	DPUPR
131	layanan CMS bank pasar & BKK dengan Aplikasi Siskeudes	Dinpermades
Jumlah		131

Tabel 2.24
Daftar Layanan Publik Secara Elektronik

No	Jenis Layanan Publik Secara Elektronik	Pemilik Layanan
1	Layanan pelaporan sms gateway	Sekretariat DPRD
2	Layanan Informasi produk Hukum	Sekretariat DPRD
3	Layanan Informasi produk Hukum	Sekretariat DPRD
4	Layanan perijinan	DPMPTSP
5	Layanan retribusi sampah	DPRKPLH
6	Layanan pengangkutan sampah	DPRKPLH
7	Permohonan Data-Data terkait Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan	DKPP
8	Pelayanan Penilaian Kesesuaian Standar Izin Operasional Puskesmas;	DKK
9	Pelayanan Penilaian Kesesuaian Standar Izin Operasional Rumah Sakit;	DKK
10	Pelayanan Penilaian Kesesuaian Standar Izin Klinik	DKK
11	Pelayanan Penilaian Kesesuaian Standar Apotek;	DKK

No	Jenis Layanan Publik Secara Elektronik	Pemilik Layanan
12	Pelayanan Penilaian Kesesuaian Standar Usaha Toko Obat;	DKK
13	Pelayanan Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IRT)	DKK
14	Layanan Retribusi Pasar	Dinkopdag
15	Layanan Tera Metrologi	Dinkopdag
16	Layanan pesan perak	DPPPKBPA
17	Layanan Pengaduan Aplikasi	Dinkominfo
18	Layanan PPID	Dinkominfo
19	Layanan Data Statistik Temanggung	Dinkominfo
20	Layanan Retribusi Pajak	BPKPAD
21	Layanan PPDB	Dindikpora
22	Layanan Dapodik	Dindikpora
23	Layanan Kependudukan	Dindukcapil
24	Layanan Perijinan Paten	Kecamatan
25	Rawat Jalan	RSUD
26	Rawat Inap	RSUD
27	Layanan Penunjang Medis dan Non Public	RSUD
28	Layanan Kegawatdaruratan	RSUD
29	Layanan Kir Kendaraan	Dishub
30	Layanan Sanka	Dinsos
31	Layanan Data Kemiskinan	Dinsos
32	Layanan Data Pariwisata	Disbudpar
33	Layanan Pendataan Kesenian	Disbudpar
34	Pendaftaran Kartu AK 1/Kartu Kuning	Dinperinaker
35	Validasi penggunaan Tenaga Kerja Asing	Dinperinaker
36	Verifikasi ijin usaha via OSS	Dinperinaker
37	Pendampingan Pendaftaran SIINAS (Aplikasi SIINAS Kemenperin)	Dinperinaker
38	Permohonan ijin persetujuan bangunan gedung	DPUPR
39	permohonan persetujuan kpr	DPUPR
40	ijin pinjam sewa alat berat	DPUPR
41	layanan CMS bank pasar & BKK dengan Aplikasi Siskeudes	Dinpermades
Jumlah		41

C. Urusan Statistik

1. Ketersediaan Data Statistik Sektoral

Data Statistik Sektoral adalah data statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut Kabupaten Temanggung melalui Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung Nomor: 050/004.1/2023 tentang Data Prioritas Statistik Sektoral, Standar Data, dan Metadata Kabupaten Temanggung tahun 2023 telah menetapkan daftar data prioritas statistik sektoral dalam rangka

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut ditetapkan 215 data prioritas statistik sektoral yang berasal dari 46 Produsen Data.

Rumus untuk menghitung Ketersediaan Data Statistik Sektoral sebagai berikut :

$$\text{Ketersediaan Data Statistik Sektoral} = \frac{\text{Jumlah Data yang Dikelola}}{\text{Jumlah Data Prioritas yang Ditetapkan}} \times 100\%$$

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Temanggung memiliki tanggung jawab penting dalam mengelola data statistik sektoral. Saat ini terdapat 215 data prioritas yang bersumber dari 46 produsen data berbeda. Pengumpulan data ini dilakukan tiga kali dalam setahun untuk memastikan bahwa informasi yang tersedia selalu akurat dan terkini.

Setelah data dikumpulkan, Dinkominfo mendiseminasikan informasi ini dalam berbagai bentuk untuk memudahkan akses publik. Ini termasuk distribusi dalam bentuk buku, soft copy, aplikasi Android, dan melalui laman data.temanggungkab.go.id. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses data yang relevan.

Buku Statistik Kabupaten Temanggung menerbitkan data statistik sektoral yang mencakup informasi dari tahun sebelumnya (n-1), sehingga masyarakat dapat melihat gambaran umum perkembangan wilayah. Sementara itu, laman data.temanggungkab.go.id menyediakan data statistik tahun berjalan yang diperbarui setiap semester. Dengan demikian, masyarakat dapat mengikuti perkembangan terbaru dan membuat keputusan berdasarkan data yang akurat.

Tabel 2.25
Ketersediaan Data Statistik Sektoral Sd. Triwulan I Tahun 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketersediaan data Statistik Sektoral	na	na	na	100	100

Dari table tersebut diatas dapat diketahui bahwa untuk tahun 2023 ketersediaan data statistik sektoral mencapai 100%, yang berarti bahwa dari 215 data prioritas yang ditetapkan semua datanya sudah terbaharui dan tersedia. Pencapaian ini menunjukkan bahwa proses pengumpulan dan pembaruan data telah dilaksanakan secara efisien dan tepat waktu sehingga kualitas dan keakuratan informasi yang tersedia bagi pengguna dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 2.26
Data Prioritas Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No.	Data Prioritas yang Ditetapkan	Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Produsen Data
1	Jarak dari Kota Temanggung ke Berbagai Kota di Jawa Tengah Melalui Jalur Terdekat,	√		BPS
2	Suhu Udara Rata-rata, Maksimum dan Minimum (°C) Kabupaten Temanggung	√		BMKG Semarang
3	Curah Hujan dan Hari Hujan Kabupaten Temanggung, -	√		BMKG Semarang
4	Luas Wilayah Kabupaten Temanggung Menurut Ketinggian dari Permukaan Laut (Hektare)	√		BPS
5	Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan di	√		BPS

No.	Data Prioritas yang Ditetapkan	Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Produsen Data
	Kabupaten Temanggung,			
6	Luas Penggunaan Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairan per Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		BPS
7	Luas Penggunaan Lahan Pertanian Bukan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Temanggung,	√		BPS
8	Jarak Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten di Kabupaten Temanggung,	√		BPS
9	Pembagian Wilayah Administrasi Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinpermades
10	Jumlah Prasarana Desa dan Jumlah Aparat Pemerintahan Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinpermades
11	Banyaknya Kegiatan dan Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Temanggung Dirinci per Bulan,	√		Sekretariat DPRD
12	Jumlah Persidangan DPRD Kabupaten Temanggung,	√		Sekretariat DPRD
13	Jumlah Persidangan Komisi DPRD Kabupaten Temanggung,	√		Sekretariat DPRD
14	Jumlah Keputusan (Produk) DPRD Kabupaten Temanggung	√		Sekretariat DPRD
15	Komposisi Anggota DPRD Menurut Fraksi dan Jenis Kelamin Kabupaten Temanggung	√		Sekretariat DPRD
16	Jumlah Anggota DPRD Menurut Fraksi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Temanggung	√		Sekretariat DPRD
17	Komposisi Anggota DPRD Menurut Fraksi dan Kelompok Umur, Kabupaten Temanggung	√		Sekretariat DPRD
18	Jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin,	√		Dindukcapil
19	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dindukcapil
20	Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun dan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Temanggung,	√		Dindukcapil
21	Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun dan Belum Memiliki Akta Kelahiran di Kabupaten Temanggung,	√		Dindukcapil
22	Jumlah Penduduk WNA Menurut Jenis Kelamin, Dewasa dan Anak-anak dan Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dindukcapil
23	Angka Kelahiran Kasar (CBR) per 1000 Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dindukcapil
24	Angka Kematian Kasar (CDR) per 1000 Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dindukcapil
25	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dindukcapil
26	Banyaknya Penduduk dan Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dindukcapil
27	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan di Kabupaten Temanggung,	√		Dindukcapil
28	Penduduk Usia 10 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Mata Pencarian per Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dindukcapil
29	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Otonom di Lingkungan Pemerintah Kab.Temanggung Menurut Unit Kerja dan Jenis Kelamin,	√		BKPSDM
30	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Otonom di Lingkungan Pemerintah Kab.Temanggung Menurut Golongan dan Jenis Kelamin,	√		BKPSDM
31	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Otonom di Lingkungan Pemerintah Kab.Temanggung Menurut Pendidikan yang Ditamatkan,	√		BKPSDM

No.	Data Prioritas yang Ditetapkan	Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Produsen Data
32	Pencari Kerja yang Mendaftarkan Diri Menurut Tingkat Pendidikan,	√		Dinperinaker
33	Pencari Kerja Belum Berpengalaman yang Mendaftarkan Diri Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinperinaker
34	Penempatan Kerja Asal Kabupaten Temanggung Menurut Antar Kerja,	√		Dinperinaker
35	Banyaknya Transmigran Asal Kabupaten Temanggung Menurut Provinsi Penempatan,	√		Dinperinaker
36	Realisasi Pemberangkatan Transmigran Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinperinaker
37	Animo Transmigrasi Menurut Daerah Asal dan Jenis Transmigrasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinperinaker
38	Banyaknya Pelayanan Akte pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung,	√		Dindukcapil
39	Banyaknya Penduduk, Penduduk Wajib ber-KTP Elektronik dan Kepemilikan KTP Elektronik Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dindukcapil
40	Jumlah Kepala Keluarga Aktual dan Jumlah kepemilikan Kartu Keluarga Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dindukcapil
41	Jumlah Anak Usia 0 – 17 Tahun dan Jumlah Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak) Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dindukcapil
42	Jumlah Penduduk Berdasarkan Status kawin Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dindukcapil
43	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dindukcapil
44	Jumlah Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dindukcapil
45	Banyaknya Sekolah dan Murid SD Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung, /	√		Dindikpora
46	Banyaknya Guru Sekolah Dasar Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung, /	√		Dindikpora
47	Banyaknya Peserta Ujian dan Persentase Kelulusan Murid SD Menurut Kecamatan di Kab. Temanggung Tahun 2020/	√		Dindikpora
48	Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru SMP Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung, /	√		Dindikpora
49	Banyaknya Peserta Ujian dan Persentase Kelulusan Murid SMP dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020/	√		Dindikpora
50	Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid Taman Kanak-Kanak Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun Pelajaran /	√		Dindikpora
51	Banyaknya Murid SD yang Mengulang dan Putus Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung, /	√		Dindikpora
52	Banyaknya Murid SMP yang Mengulang dan Putus Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung, /	√		Dindikpora
53	Banyaknya PAUD, Murid dan Guru Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun Pelajaran /	√		Dindikpora
54	Nilai APK dan APM PAUD, SD, SMP dan SM Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun Pelajaran /	√		Dindikpora
55	Banyaknya Perpustakaan Sekolah Menurut Jenisnya Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung, /	√		Dindikpora
56	Banyaknya Tenaga Medis, Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya di Lingkungan Dinas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinkes

No.	Data Prioritas yang Ditetapkan	Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Produsen Data
57	Banyaknya Pengunjung yang Berobat ke PUSKESMAS menurut Kecamatan Dirinci Per Tri Wulan di Kab. Temanggung,	√		Dinkes
58	Banyaknya Rumah Sakit, Klinik Bersalin, Puskesmas, Klinik Pratama, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan PKD Menurut Kecamatan di Kab. Temanggung,	√		Dinkes
59	Banyaknya Pengunjung yang Berobat ke PUSKESMAS Menurut Jenis Pembayaran dan Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinkes
60	Banyaknya Posyandu Menurut Kategori dan Prevalensi Status Gizi Balita Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinkes
61	Banyaknya Tenaga Kesehatan dan Non-Kesehatan Dirinci Menurut Jenis Ketenagaan dan Status Pegawai di Kabupaten Temanggung,	√		4 RS
62	Penyakit Terbanyak yang Diderita Pasien Rawat Inap di Kabupaten Temanggung,	√		4 RS
63	Penyakit Terbanyak yang Diderita Pasien Rawat Jalan di Kabupaten Temanggung,	√		4 RS
64	Banyaknya Kunjungan Rawat Jalan Dirinci Menurut Jenis Poliklinik Kabupaten Temanggung,	√		4 RS
65	Nilai Indikator Pelayanan Rumah Sakit Kabupaten Temanggung,	√		4 RS
66	Persediaan dan Pemakaian Darah di Unit Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten Temanggung Dirinci Menurut Bulan,	√		PMI
67	Banyaknya Penggunaan Darah Dirinci Menurut Bulan dan Bagian yang Menerima di Unit Donor Darah PMI Kabupaten Temanggung,	√		PMI
68	Produksi dan Pemakaian Darah di Unit Donor Darah PMI Kabupaten Temanggung,	√		PMI
69	Realisasi Penyaluran Dana PMI Kabupaten Temanggung Dirinci Menurut Bulan,	√		PMI
70	Banyaknya Anggota dan Pembina PMR di Kabupaten Temanggung,	√		PMI
71	Realisasi Penyaluran Obat-obatan PMI Cab. Temanggung,	√		PMI
72	Banyaknya Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktip Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		DPPPAPPKB
73	Banyaknya Peserta KB Aktif yang Menggunakan Kontrasepsi MKJP di Kabupaten Temanggung Dirinci Menurut Kecamatan,	√		DPPPAPPKB
74	Peserta KB Aktif yang Menggunakan Kontrasepsi Non MKJP Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		DPPPAPPKB
75	Jumlah Sarana Tempat Pelayanan Kontrasepsi Keluarga Berencana Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		DPPPAPPKB
76	Jumlah Pencapaian Akseptor Baru Dirinci Menurut Metode Kontrasepsi dan Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		DPPPAPPKB
77	Banyaknya Tenaga Lapangan BKBPP Dalam Operasional Gerakan Keluarga Berencana Nasional di Kabupaten Temanggung,	√		DPPPAPPKB
78	Banyaknya Institusi Masyarakat (Pagubuyan KB) yang Mendukung Gerakan Keluarga Berencana Nasional di Kabupaten Temanggung,	√		DPPPAPPKB
79	Banyaknya Kelompok Kegiatan Bina-Bina Keluarga dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Temanggung,	√		DPPPAPPKB
80	Banyaknya Pemeluk Agama Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Kemenag

No.	Data Prioritas yang Ditetapkan	Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Produsen Data
81	Banyaknya Tempat Ibadah Dirinci Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Kemenag
82	Jumlah Majelis Taklim, Muallim dan Jamaah Menurut Kecamatan Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Kemenag
83	Banyaknya Nikah, Talak, Rujuk dan Cerai Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Kemenag
84	Banyaknya Jama'ah Haji Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Temanggung,	√		Kemenag
85	Banyaknya Penduduk yang Menunaikan Ibadah Haji Dirinci Menurut Jenjang Pendidikan dan Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Kemenag
86	Banyaknya Penduduk yang Menunaikan Ibadah Haji Dirinci Menurut Kelompok Umur dan Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Kemenag
87	Banyaknya Sekolah dan Murid Madrasah Ibtidaiyah Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun Ajaran /	√		Kemenag
88	Banyaknya Guru Madrasah Ibtidaiyah Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun Ajaran /	√		Kemenag
89	Banyaknya Peserta Ujian dan Persentase Kelulusan Murid MI Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun /	√		Kemenag
90	Banyaknya Sekolah dan Murid Madrasah Tsanawiyah Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun /	√		Kemenag
91	Banyaknya Guru Madrasah Tsanawiyah Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun /	√		Kemenag
92	Banyaknya Peserta Ujian dan Persentase Kelulusan Murid MTs Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun /	√		Kemenag
93	Banyaknya Sekolah dan Murid Madrasah Aliyah Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun /	√		Kemenag
94	Banyaknya Guru Madrasah Aliyah Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun /	√		Kemenag
95	Banyaknya Peserta Ujian dan Persentase Kelulusan Murid MA Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun /	√		Kemenag
96	Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru Taman Kanak-kanak (RA) Per Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun /	√		Kemenag
97	Banyaknya Sekolah dan Perguruan Tinggi Islam Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Kemenag
98	Banyaknya Guru Dosen di Sekolah dan Perguruan Tinggi Islam Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Kemenag
99	Banyaknya Murid dan Mahasiswa di Sekolah dan Perguruan Tinggi Islam Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Kemenag
100	Banyaknya Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang Mengulang dan Putus Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun Ajaran /	√		Kemenag
101	Banyaknya Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang Mengulang dan Putus Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun Ajaran /	√		Kemenag
102	Banyaknya Murid Madrasah Aliyah (MA) yang Mengulang dan Putus Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun Ajaran /	√		Kemenag
103	Jumlah Pondok Pesantren dan Santri Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Kemenag
104	Jumlah Taman Pendidikan Alquran (TPQ), Jumlah	√		Kemenag

No.	Data Prioritas yang Ditetapkan	Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Produsen Data
	Pengajar dan Jumlah Santri Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,			
105	Banyaknya Sekolah Diniyah Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Kemenag
106	Banyaknya Perkara yang Masuk Dirinci Menurut Jenis Perkara di Kabupaten Temanggung,	√		Pengadilan Agama
107	Banyaknya Perceraian Dirinci Menurut Bulan dan Faktor Penyebab Perceraian di Kabupaten Temanggung,	√		Pengadilan Agama
108	Banyaknya Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Pengadilan Agama
109	Jumlah Perkara Yang Diterima pada Pengadilan Agama Temanggung Kelas I.B Dirinci Menurut Bulan dan Jenisnya di Kabupaten Temanggung ,	√		Pengadilan Agama
110	Jumlah Perkara yang Diputus pada Pengadilan Agama Kelas I.B Dirinci Menurut Bulan dan Jenisnya di Kabupaten Temanggung,	√		Pengadilan Agama
111	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Dirinci Menurut Bulan dan Jenis Acara di Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung,	√		Pengadilan Negeri
112	Jumlah Terdakwa yang Diselesaikan Dirinci Menurut Bulan dan Jenis Acara di Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung,	√		Pengadilan Negeri
113	Jumlah Terdakwa /Terhukum yang Diselesaikan Dirinci Menurut Bulan, Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Pengadilan Negeri Di Kabupaten Temanggung,	√		Pengadilan Negeri
114	Jumlah Terdakwa /Terhukum yang Diselesaikan Dirinci Menurut Bulan dan Sikap Terhadap Keputusan di Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung,	√		Pengadilan Negeri
115	Jumlah Perkara Perdata Gugatan yang Diselesaikan Dirinci Menurut Bulan dan Jenis Perkara di Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung,	√		Pengadilan Negeri
116	Jenis Perkara Perdata yang Diterima dan Diputus Dirinci Menurut Bulan dan Jenis Perkara di Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung,	√		Pengadilan Negeri
117	Proses Perkara Pidana yang Diterima dan Diputus Dirinci Menurut Bulan dan Jenis Perkara di Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung,	√		Pengadilan Negeri
118	Perkara Pidana Ringan dan Lalu Lintas yang Diterima, Diputus dan Jumlah Denda Dirinci Menurut Bulan di Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung,	√		Pengadilan Negeri
119	Jumlah Tahanan dan Kapasitas Tempat Dirinci Menurut Bulan di Rumah Tahanan Kabupaten Temanggung,	√		Rumah Tahanan
120	Tambahan Narapidana Termasuk Pidana Kurungan Pengganti Denda Berdasarkan Keputusan Pengadilan Dirinci Menurut Jenis Kejahatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Temanggung,	√		Rumah Tahanan
121	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Dirinci Menurut Kecamatan dan Jenis Pelanggarana di Wilayah Kabupaten Temanggung,	√		Polres
122	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Korbanya Dirinci Menurut Kecamatan dan Jenis Korban di Wilayah Kabupaten Temanggung,	√		Polres
123	Jumlah Kejadian Tindak Pidana Yang dilaporkan Dirinci Menurut Kecamatan Dan jenis Kejahatan/Pelanggaran di Kepolisian Resort Temanggung,	√		Polres
124	Banyaknya Becana Alam, Kerugian dan Bantuan yang Diberikan Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinsos
125	Banyaknya Becana Sosial, Kerugian dan Bantuan yang Diberikan Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinsos

No.	Data Prioritas yang Ditetapkan	Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Produsen Data
126	Banyaknya Pekerja Sosial Masyarakat Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinsos
127	Banyaknya Pekerja Sosial Masyarakat Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinsos
128	Jumlah Mutasi Penerima Manfaat (Kelayan) di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual "Kartini" Temanggung	√		Sentra Terpadu Kartini
129	Banyaknya Penerima Manfaat (Kelayan) Menurut Jenis Kelamin di Pusat Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG)"Kartini" Temanggung	√		Sentra Terpadu Kartini
130	Jumlah Penerima Manfaat (Kelayan) dan Instruktur/Pendamping Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG) "Kartini" Temanggung	√		Sentra Terpadu Kartini
131	Jumlah Penerima Manfaat (Anak Negara) Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG) "Kartini" Temanggung	√		Sentra Terpadu Kartini
132	Jumlah Penerima Manfaat di Dalam Lembaga Menurut Kelompok Umur di Sentra Terpadu Kartini	√		Sentra Terpadu Kartini
133	Jumlah Penerima Manfaat di Luar Lembaga Menurut Kelompok Umur di Sentra terpadu Kartini	√		Sentra Terpadu Kartini
134	Data Penerima Manfaat Tuna Netra di Balai Rehabilitasi Soaial"Penganthi" Temanggung	√		PPSDN "Penganthi"
135	Banyaknya Penerima Manfaat (Kelayan) Menurut Jenis Kelamin yang Disantuni di PTNTRW "Penganti" Temanggung	√		PPSDN "Penganthi"
136	Jumlah Penerima Manfaat dan Instruktur di Balai Rehabilitasi "Penganti" Temanggung,	√		PPSDN "Penganthi"
137	Banyaknya Swadaya Masyarakat Murni dan Pendukung Kegiatan Pembangunan Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinpermades
138	Banyaknya LPMD / LPMK dan Pengurus Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinpermades
139	Banyaknya Sarana & Prasarana Persampahan Yang Berfungsi di Kabupaten Temanggung, -	√		DPRKPLH
140	Produksi Sampah Rata-rata per hari (M3) pada Daerah /kawasan Yang Terlayani di Kabupaten Temanggung	√		DPRKPLH
141	Frekuensi Kebakaran, Banyaknya Korban dan taksiran Kerugian di Kabupaten Temanggung	√		Satpol PP dan Damkar
142	Banyaknya Bencana Kebakaran, yang Terbakar dan Kehilangan Tempat Tinggal di Kabupaten Temanggung	√		Satpol PP dan Damkar
143	Banyaknya Bencana Kebakaran Dirinci Menurut Bulan Di Kabupaten Temanggung	√		Satpol PP dan Damkar
144	Hasil Analisa Kualitas Air Sungai dan Mata Air di kabupaten Temanggung,	√		DPRKPLH
145	Pengukuran Kualitas Udara Ambien Menurut Lokasi di Kabupaten Temanggung,	√		DPRKPLH
146	Luas Panen dan Jumlah Produksi Tanaman Padi dan Palawija Dirinci Menurut jenis Tanaman per Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		DKPPP
147	Luas Panen dan Jumlah Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Temanggung,	√		DKPPP
148	Jumlah Tanaman Buah-Buahan yang Menghasilkan dan Produksinya Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Temanggung,	√		DKPPP
149	Realisasi Kebutuhan Pupuk Untuk Sub Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan Dirinci per Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		DKPPP
150	Luas Tanaman dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Dirinci Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman	√		DKPPP

No.	Data Prioritas yang Ditetapkan	Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Produsen Data
	di Kabupaten Temanggung,			
151	Luas Panen dan Produksi Tanaman Biofarmakan yang Menghasilkan Dirinci Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Temanggung,	√		DKPPP
152	Luas Hutan Rakyat dan Lahan Kritis menurut Kecamatan Di Kabupaten Temanggung, -	√		DKPPP
153	Jumlah Penyuluh Pertanian Menurut Kecamatan Di Kabupaten Temanggung,	√		DKPPP
154	Produksi Perhutani dan Hasil Hutan Lainnya Dirinci Menurut Jenis Komoditi di Kabupaten Temanggung tahun -	√		Perum Perhutani
155	Luas Pangkuan Hutan Negara berdasarkan Resor Pengelolaan Hutan (RPH) dan Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Perum Perhutani
156	Populasi Ternak Besar Dirinci Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Temanggung,	√		DKPPP
157	Populasi Ternak Kecil Dirinci Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Temanggung,	√		DKPPP
158	Populasi Ternak Unggas Dirinci Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Temanggung,	√		DKPPP
159	Jumlah Produksi Daging, Telur dan Susu Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		DKPPP
160	Perdagangan Ternak di Pasar Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Temanggung,	√		DKPPP
161	Hasil dan Nilai Produksi Ikan Kolam Dirinci Menurut Kecamatan dan Jenis Ikan di Kabupaten Temanggung,	√		DKPPP
162	Hasil dan Nilai Produksi Ikan Budidaya Mina Padi Dirinci Menurut Kecamatan dan Jenis Ikan di Kabupaten Temanggung,	√		DKPPP
163	Hasil Produksi Benih Ikan di Unit Pembenihan Rakyat (UPR) menurut Kecamatan Di Kabupaten Temanggung,	√		DKPPP
164	Produksi dan Nilai Hasil Penangkapan Ikan di Sungai Dirinci Menurut Kecamatan dan Jenis Ikan di Kabupaten Temanggung,	√		DKPPP
165	Produksi dan Nilai Hasil Penangkapan Ikan di Genangan/Cek Dirinci Menurut Kecamatan dan Jenis Ikan di Kabupaten Temanggung,	√		DKPPP
166	Produksi dan Nilai Hasil Penangkapan Ikan di Jaring Apung Dirinci Menurut Jenis Ikan dan Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		DKPPP
167	Banyaknya Unit Usaha Industri dan Tenaga Kerja Dirinci Menurut Klasifikasi Industri per Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinperinaker
168	Banyaknya Unit Usaha Industri, Tenaga Kerja, Nilai Investasi dan Nilai Produksi Dirinci Menurut Kelompok Industri di Kabupaten Temanggung,	√		Dinperinaker
169	Realisasi Volume dan Nilai Ekspor Produk Industri Menurut Komoditas di Kabupaten Temanggung	√		Dinkopdag
170	Banyaknya Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Menurut Jenis Industri di Kabupaten Temanggung,	√		Dinperinaker
171	Jenis, Jumlah dan Nilai Produksi Sektor Industri Menurut Jenis Industri di Kabupaten Temanggung,	√		Dinperinaker
172	Perkembangan Pelanggan Listrik Dirinci Menurut Kecamatan di Wilayah PLN Rayon Temanggung -	√		PLN Temanggung
173	Perkembangan Pelanggan Listrik Dirinci Menurut Kecamatan di Wilayah PLN Rayon Parakan, -	√		PLN Parakan
174	Perkembangan Pelanggan Listrik Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung, -	√		PLN Temanggung dan Parakan
175	Perkembangan Pelanggan dan Daya VA Dirinci Menurut Bulan di Wilayah Cabang PLN Temanggung,	√		PLN Temanggung

No.	Data Prioritas yang Ditetapkan	Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Produsen Data
176	Perkembangan Pelanggan dan Daya VA Dirinci Menurut Bulan di Wilayah Cabang PLN Parakan,	√		PLN Parakan
177	Perkembangan Pelanggan dan Daya VA Listrik di Wilayah Rayon PLN Temanggung,	√		PLN Temanggung dan Parakan
178	Banyaknya Pelanggan PDAM Menurut Jenisnya Dirinci per Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Perumda Air Minum Tirta Agung
179	Banyaknya Pelanggan Air yang disalurkan dan Nilainya Dirinci Menurut Kategori Pelanggan di Kabupaten temanggung,	√		Perumda Air Minum Tirta Agung
180	Banyaknya Mata Air yang Dikelola PDAM Kabupaten Temanggung, Dirinci per Kecamatan DiKabupaten Temanggung,	√		Perumda Air Minum Tirta Agung
181	Banyaknya Penanganan Pengaduan Pelangan PDAM Kabupaten Temanggung,	√		Perumda Air Minum Tirta Agung
182	Banyaknya Pengiriman Air dengan Mobil Tangki dan Nilainya Menurut Kategori Pengiriman di Kabupaten Temanggung,	√		Perumda Air Minum Tirta Agung
183	Jumlah Penjualan Bahan Bakar dan Minyak Pelumas Dirinci per Bulan pada SPBU di Kabupaten Temanggung,	√		Dinkopdag
184	Capaian Tera atau Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	√		Dinkopdag
185	Panjang Jalan Menurut Keadaan dan Status Jalan di Kabupaten Temanggung, 2020 -	√		DPUPR
186	Jumlah Pengujian Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya Dirinci per Bulan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinhub
187	Jumlah Rit Bis yang Masuk Terminal Dirinci per Bulan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinhub
188	Jumlah Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinhub
189	Jumlah Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinhub
190	Banyaknya Pengunjung Obyek Wisata Dirinci PerBulan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinbudpar
191	Pendapatan Obyek Wisata dari Karcis Masuk, Fasilitas danTempat Parkir di Kabupaten Temanggung,	√		Dinbudpar
192	Banyaknya Pengunjung Pikatan Water Park Temanggung Per Bulan di Kabupaten Temanggung, -	√		PD Bhumi Phala Wisata
193	Persentase Hunian Kamar, Rata-rata Lama Tamu Menginapdi Kabupaten Temanggung,	√		BPS
194	Banyaknya Pelanggan Telepon Dirinci per Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		PT. Telkom
195	Banyaknya Kantor Pos Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		PT. POS Indonesia
196	Banyaknya Pelanggan Telepon Dirinci per Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		PT. POS Indonesia
197	Banyaknya Lalu Lintas Wesel Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		PT. POS Indonesia
198	Banyaknya Lalu Lintas Pos Udara yang Dikirim dan Diterima dari Dalam dan Luar Negeri Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		PT. POS Indonesia
199	Banyaknya Lalu Lintas Paket Pos yang Dikirim dan Diterima dari Dalam dan Luar Negeri Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		PT. POS Indonesia
200	Realisasi Pendapatan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran	√		BPKPAD
201	Realisasi Pembiayaan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran	√		BPKPAD
202	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Unit Pelayanan Pendapatan Dan Pemberdayaan Aset	√		UPPD

No.	Data Prioritas yang Ditetapkan	Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Produsen Data
	daerah Kabupaten temanggung Dirinci per bulan,			
203	Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Ber motor Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Dirinci per Bulan,	√		UPPD
204	Obyek Pajak Kendaraan Unit Pelayanan Pendapatan Dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Dirinci per Bulan,	√		UPPD
205	Obyek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Unit Pelayanan Pendapatan Dan Pemberdayaan Aset Daerah Kab. Temanggung Dirinci per Bulan,	√		UPPD
206	Penerimaan Pajak Air Permukaan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Temanggung Dirinci Per Bulan,	√		UPPD
207	Hasil Penerimaan Pajak wilayah Kerja Kantor Pajak Pratama Kabupaten Temanggung,	√		KPP Pratama
208	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di Kabupaten Temanggung	√		KPP Pratama
209	Jumlah Koperasi, Anggota, Permodalan, Tenaga Kerja, SHU, Aset dan Volume Usaha Menurut Usahanya di Kabupaten Temanggung,	√		Dinkopdag
210	Jumlah Koperasi, Anggota, Permodalan, Tenaga Kerja, SHU, Aset dan Volume Usaha Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinkopdag
211	Banyaknya Pasar Daerah dan Pasar Desa Menurut Jenisnya Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinkopdag
212	Rata-Rata Harga Eceran Beberapa Bahan Pokok di Pasar Kabupaten Temanggung,	√		Dinkopdag
213	Rata-rata Harga Eceran Sayur-sayuran dan Bumbu-bumbuan Kabupaten Temanggung	√		Dinkopdag
214	Realisasi Investasi PMDB Menurut Sektor, -	√		DPM
215	Jumlah Ijin Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Selama Tahun	√		DPM

Dengan data statistik yang lengkap dan terbaru, pihak-pihak yang membutuhkan informasi ini, seperti pembuat kebijakan, peneliti, dan masyarakat umum, dapat melakukan analisis yang lebih akurat dan mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang tersedia.

D. Urusan Persandian

1. Persentase Penilaian Resiko Keamanan Informasi

Penilaian resiko keamanan informasi adalah indek untuk mengukur kematangan dan kesiapan perangkat daerah dalam menanggulangi ancaman terhadap gangguan ataupun hambatan yang dapat mengganggu Keamanan Informasi di lingkup pemerintah daerah yang dalam penilaiannya menggunakan form ataupun tools yang disebut Indek KAMI.

Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisa kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan Instansi/Perusahaan. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar ISO/IEC 27001:2013.

Bentuk evaluasi yang diterapkan dalam indeks KAMI dirancang untuk dapat

digunakan oleh suatu organisasi dari berbagai tingkatan, ukuran, maupun tingkat kepentingan penggunaan TIK dalam mendukung terlaksananya proses yang ada. Data yang digunakan dalam evaluasi ini nantinya akan memberikan snapshot indeks kesiapan dari aspek kelengkapan maupun kematangan kerangka kerja keamanan informasi yang diterapkan dan dapat digunakan sebagai pembandingan dalam rangka menyusun langkah perbaikan dan penetapan prioritasnya.

Alat evaluasi ini kemudian bisa digunakan secara berkala untuk mendapatkan gambaran perubahan kondisi keamanan informasi sebagai hasil dari program kerja yang dijalankan, sekaligus sebagai sarana untuk menyampaikan peningkatan kesiapan kepada pihak yang terkait (stakeholders).

Khusus untuk Instansi Pemerintah, penggunaan dan publikasi hasil evaluasi Indeks KAMI merupakan bentuk tanggungjawab penggunaan dana publik sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran mengenai kebutuhan keamanan informasi. Pertukaran informasi dan diskusi dengan Instansi pemerintah lainnya sebagai bagian dari penggunaan alat evaluasi Indeks KAMI ini juga menciptakan alur komunikasi antar pengelola keamanan informasi di sektor pemerintah sehingga semua pihak dapat mengambil manfaat dari lesson learned yang sudah dilalui.

Alat evaluasi Indeks KAMI ini dapat digunakan oleh organisasi dengan skala nasional, maupun yang berukuran kecil. Penggunaan di Instansi pemerintah dapat dilakukan di tingkat pusat maupun satuan kerja yang ada di tingkatan Direktorat Jenderal, Badan, Pusat atau Direktorat untuk mendapatkan gambaran mengenai kematangan program kerja keamanan informasi yang dijalanannya. Evaluasi ini dianjurkan untuk dilakukan oleh pejabat yang secara langsung bertanggungjawab dan berwenang untuk mengelola keamanan informasi di seluruh cakupan instansinya.

Proses evaluasi dilakukan melalui sejumlah pertanyaan di masing-masing area sebagai berikut:

- 1) Kategori Sistem Elektronik yang digunakan Instansi
- 2) Tata Kelola Keamanan Informasi
- 3) Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi
- 4) Kerangka Kerja Keamanan Informasi
- 5) Pengelolaan Aset Informasi, dan
- 6) Teknologi dan Keamanan Informasi

Dan ditambah dengan Suplemen yaitu Area evaluasi untuk aspek Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan (Cloud Service) dan Perlindungan Data Pribadi.

Pertanyaan yang ada belum tentu dapat dijawab semuanya, akan tetapi yang harus diperhatikan adalah jawaban yang diberikan harus merefleksikan kondisi penerapan keamanan informasi SESUNGGUHNYA. Alat evaluasi ini hanya akan memberikan nilai tambah bagi semua pihak apabila pengisiannya menggunakan azas keterbukaan dan kejujuran.

Penggunaan aplikasi Indeks KAMI ini bisa dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah daerah dan kemudian untuk verifikasi dari nilai yang didapatkan akan diverifikasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara sebagai Instansi yang berwenang untuk menilai tingkat Kematangan Keamanan Informasi tersebut.

Dari 6 area yang dinilai tersebut nantinya dapat dipetakan bahwa suatu daerah itu sudah termasuk kategori Tingkat 1 sampai dengan 4 dengan nilai maksimal 635 point untuk total semua area yang dinilai.

Untuk menentukan persentase indeks KAMI adalah dengan menghitung Jumlah nilai per area Indeks KAMI di Kabupaten Temanggung dibagi Nilai maksimal seluruh area Indeks KAMI yang ditetapkan oleh BSSN dikali 100%

Untuk tahun 2024 berdasarkan self Assesment atau penilaian mandiri maka hasil nilai Indeks KAMI dari 6 area penilaian adalah 263 dari target tahun 2024

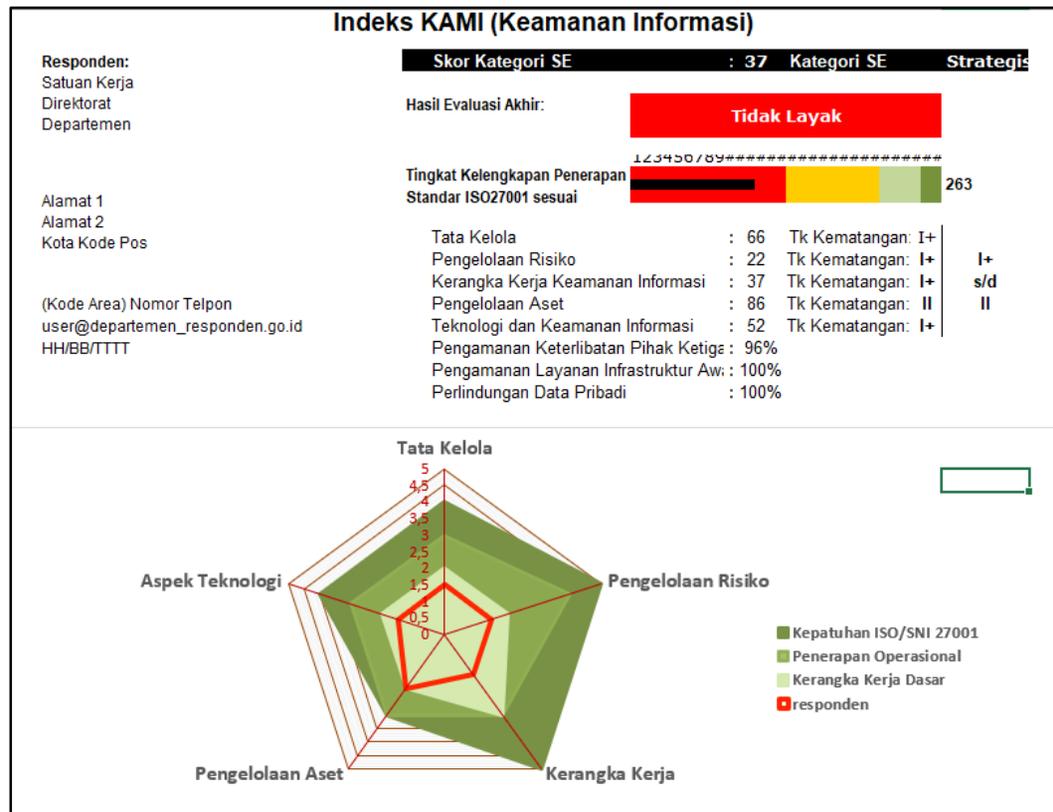
sebesar 300 sehingga persentase yang didapatkan adalah $263/300 \times 100\% = 78,9\%$

Tabel 2.27
Persentase Penilaian Resiko Keamanan Informasi

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penilaian Resiko Keamanan Informasi	0%	0%	0%	0%	78,9%

Tabel 2.28
Nilai Indeks KAMI Kabupaten Temanggung

Tahun	Nilai	Metode Penilaian
2020	N/A	Tidak melakukan penilaian Indeks KAMI
2021	N/A	Tidak melakukan penilaian Indeks KAMI
2022	N/A	Tidak melakukan penilaian Indeks KAMI
2023	N/A	Tidak melakukan penilaian Indeks KAMI
2024	263	<i>Self Assesment</i>



Tabel 2.29
Tabel Penilaian Indeks Kami

	[Kategori Sistem Elektronik] Rendah; Tinggi; Strategis	Status	Skor
	Karakteristik Instansi/Perusahaan		
1.1	Nilai investasi sistem elektronik yang terpasang [A] Lebih dari Rp.30 Miliar [B] Lebih dari Rp.3 Miliar s/d Rp.30 Miliar [C] Kurang dari Rp.3 Miliar	C	1
1.2	Total anggaran operasional tahunan yang dialokasikan untuk pengelolaan Sistem Elektronik [A] Lebih dari Rp.10 Miliar [B] Lebih dari Rp.1 Miliar s/d Rp.10 Miliar [C] Kurang dari Rp.1 Miliar	C	1
1.3	Memiliki kewajiban kepatuhan terhadap Peraturan atau Standar tertentu [A] Peraturan atau Standar nasional dan internasional [B] Peraturan atau Standar nasional [C] Tidak ada Peraturan khusus	B	2
1.4	Menggunakan teknik 1.5kriptografi khusus untuk keamanan informasi dalam Sistem Elektronik [A] Teknik kriptografi khusus yang disertifikasi oleh Negara [B] Teknik kriptografi sesuai standar industri, tersedia secara publik atau dikembangkan sendiri [C] Tidak ada penggunaan teknik kriptografi	B	2
1.5	Jumlah pengguna Sistem Elektronik [A] Lebih dari 5.000 pengguna [B] 1.000 sampai dengan 5.000 pengguna [C] Kurang dari 1.000 pengguna	A	5
1.6	Data pribadi yang dikelola Sistem Elektronik [A] Data pribadi yang memiliki hubungan dengan Data Pribadi lainnya [B] Data pribadi yang bersifat individu dan/atau data pribadi yang terkait dengan kepemilikan badan usaha [C] Tidak ada data pribadi	B	2
1.7	Tingkat klasifikasi/kekritisn Data yang ada dalam Sistem Elektronik, relatif terhadap ancaman upaya penyerangan atau penerobosan keamanan informasi [A] Sangat Rahasia [B] Rahasia dan/ atau Terbatas [C] Biasa	B	2
1.8	Tingkat kekritisn proses yang ada dalam Sistem Elektronik, relatif terhadap ancaman upaya penyerangan atau penerobosan keamanan informasi [A] Proses yang berisiko mengganggu hajat hidup orang banyak dan memberi dampak langsung pada layanan publik [B] Proses yang berisiko mengganggu hajat hidup orang banyak dan memberi dampak tidak langsung [C] Proses yang hanya berdampak pada bisnis perusahaan	B	2
1.9	Dampak dari kegagalan Sistem Elektronik [A] Tidak tersedianya layanan publik berskala nasional atau membahayakan pertahanan keamanan negara [B] Tidak tersedianya layanan publik dalam 1 propinsi atau lebih	C	1

[Kategori Sistem Elektronik] Rendah; Tinggi; Strategis		Status	Skor
	[C] Tidak tersedianya layanan publik dalam 1 kabupaten/kota atau lebih		
1.10	Potensi kerugian atau dampak negatif dari insiden ditembusnya keamanan informasi Sistem Elektronik (sabotase, terorisme) [A] Menimbulkan korban jiwa [B] Terbatas pada kerugian finansial [C] Mengakibatkan gangguan operasional sementara (tidak membahayakan dan mengakibatkan kerugian finansial)	C	1

Tabel 2.30
Kategori Sistem Elektronik Untuk penilaian indek KAMI

KATEGORI SISTEM ELEKTRONIK				
Rendah		Skor Akhir		Status Kesiapan
10	15	0	174	Tidak Layak
		175	312	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar
		313	535	Cukup Baik
		536	645	Baik
Tinggi		Skor Akhir		Status Kesiapan
16	34	0	272	Tidak Layak
		273	455	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar
		456	583	Cukup Baik
		584	645	Baik
Strategis		Skor Akhir		Status Kesiapan
35	50	0	333	Tidak Layak
		334	535	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar
		536	609	Cukup Baik
		610	645	Baik

Berdasarkan klasifikasi system elektronik yang ada di Pemerintah Kabupaten Temanggung maka hasil dari Penilaian kategori system elektronik mendapatkan nilai 19 sehingga masuk dalam kategori Tinggi. Sedangkan untuk nilai akhir indek KAMI mendapatkan nilai 263 untuk kategori sistem elektronik dengan kategori tinggi masuk ke dalam klasifikasi TIDAK LAYAK. Sehingga dalam Tahun 2024 ini berdasarkan target yang ada adalah meningkatkan nilai menjadi minimal 300 untuk masuk dalam kategori Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar.

2. Persentase Pelaksanaan Prosedur Pengamanan Informasi Pada Perangkat Daerah

Pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah dapat dilaksanakan dengan melaksanakan ITSA (Information Technology Security Assesment) yang digunakan untuk pengujian kerentanan, pemberian saran dan rekomendasi pengamanan untuk meminimalisir celah kerawanan yang terdapat dalam suatu sistem informasi. ITSA dilaksanakan oleh BSSN dengan prosedur sebagai berikut:



Gambar 2.9
Alur Layanan ITSA

Dikarenakan keterbatasan kuota ITSA yang dapat dilaksanakan oleh BSSN maka Pemerintah Daerah dapat Melaksanakan secara mandiri pengujian ITSA tersebut dengan syarat sudah mempunyai personil yang memiliki kualifikasi sebagai Pentester dan mempunyai sertifikasi. Untuk pemerintah Kabupaten Temanggung sudah mempunyai 1 orang yang dapat melakukan pengujian tersebut dengan tetap berkoordinasi dengan instansi Pembina yaitu BSSN. Dan untuk tetap dapat mengikuti perkembangan teknologi yang ada maka tetap dibutuhkan untuk setiap saat mengupdate kemampuan yang dimiliki oleh personil pentester tersebut.

Dari semua aplikasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Temanggung tentunya tidak dapat untuk dapat dilakukan pengujian semua aplikasi tersebut, sehingga untuk pengujian dapat dilakukan dengan target pengujian 5 aplikasi per tahun. Dan Apabila ada aplikasi yang baru dibuat atau diupdate tentunya tetap akan dilaksanakan pengujian ulang.

Untuk memperoleh angka Persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah dengan menggunakan rumus jumlah aplikasi yang sudah dilakukan VA dibagi jumlah target aplikasi yang akan dilaksanakan Vulnerability Assesment (VA) dikali 100%. Dan pada Triwulan 1 Tahun 2024 Dinkominfo Kabupaten Temanggung sudah melaksanakan VA pada 4 aplikasi dari target 5 aplikasi sehingga persentase adalah $4/5 \times 100\% = 80\%$.

Tabel 231
Persentase Pelaksanaan Prosedur Pengamanan Informasi Pada Perangkat Daerah

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pelaksanaan Prosedur Pengamanan Informasi Pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	80%

Tabel 2.32
Aplikasi yang sudah dilakukan Vulnerability Assesment (VA) Tahun 2024

No	Uraian	Pelaksanaan VA Sudah/belum	Kategori Bug
1	Mediacenter.temanggungkab.go.id	Sudah	Critical
2	Temanggungkab.go.id	Sudah	Medium
3	Sid.temanggungkab.go.id	Sudah	Medium
4.	Sipt.temanggungkab.go.id	Sudah	Medium
5	Jdihdprd.temanggungkab.go.id	belum	-

Untuk Pengujian VA ini terhadap 4 aplikasi yang dilaksanakan Tahun 2024 ini maka didapatkan untuk kategori Critical ada 1 Aplikasi yaitu mediacenter.temanggungkab.go.id yang perlu mendapatkan perhatian karena adanya lubang-lubang keamanan yang ada sehingga dari bidang Statistik dan persandian sudah memberikan umpan balik kepada bidang TIK untuk segera mengupdate website tersebut dan sudah dilaksanakan secara bertahap.

E. Penutup

Data Pokok Pembangunan Daerah pada intinya mengandung data / informasi dasar yang menggambarkan (fakta) karakteristik dasar suatu daerah. Data pokok inilah yang akan dimanfaatkan sebagai sarana penyedia data untuk memberikan informasi tentang kondisi daerah. Dengan mengacu pada data pokok pembangunan ini diharapkan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasar dukungan data dan informasi yang secara obyektif dan bukan berdasar berbagai bentuk pertimbangan yang mengandung muatan subyektif.

Pembangunan daerah merupakan kegiatan yang berkesinambungan sehingga sangat diperlukan perencanaan yang berkualitas, dan tentu saja kualitas perencanaan ditentukan oleh kualitas data dan informasi tentang kinerja masa lampau dan visi tentang masa depan. Tanpa keduanya, dokumen perencanaan akan identik dengan dokumentasi angan-angan. Dari sudut penyusunannya, kualitas dokumen perencanaan sangat ditentukan oleh ketersediaan data mutakhir yang relevan, baik data tentang kondisi, potensi, sarana dan prasarana, komoditi, tantangan pembangunan daerah maupun spesifikasi masing-masing sektor yang ada dan keterkaitan antara keduanya.

Dengan disusunnya data pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung ini diharapkan akan banyak membantu dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah pada masa yang akan datang.

Temanggung, 5 April 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006